

RENCANA STRATEGIS

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2025-2029

Blue Economy



Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Jl. Ahmad Yani No. 40 Tenggarong

KATA PENGANTAR

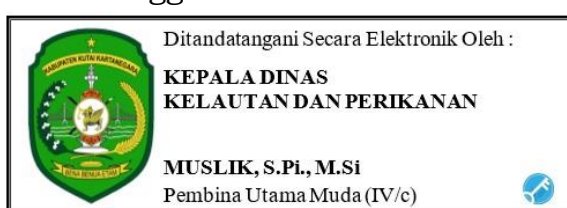
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman teknokratis penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan melalui penguatan produktivitas, nilai tambah, serta daya saing sektor perikanan daerah.

Renstra ini mengoperasionalkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi dasar bagi perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang efektif, terukur, dan mampu menjawab tantangan strategis sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir maupun daratan.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun, perangkat daerah terkait, pelaku usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan konstruktif. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam upaya mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta menyejahterakan masyarakat.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 31 Desember 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PEMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia.....	21
2.1.2.2. Sarana dan Prasarana	25
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja	31
2.1.3.2. Kinerja Anggaran	51
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	57
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	57
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	58
2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah.....	58
2.2.2. Isu Strategis.....	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ..	64
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	64
3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	65
3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	67
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	71
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
4.1. Uraian Program.....	75
4.2. Uraian Kegiatan	76
4.3. Uraian Sub Kegiatan.....	77

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program	
Prioritas Pembangunan Daerah	118
4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	121
4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	121
BAB V PENUTUP	122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2025	22
Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan, 2025	23
Tabel 2.3 Jumlah dan Persentase Pegawai Jabatan, 2025	24
Tabel 2.4 Daftar Aset	25
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kutai Kartanegara	32
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	52
Tabel 2.7 Perumusan Permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan ..	58
Tabel 2.8 Isu Strategis	61
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran.....	66
Tabel 3.2 Penahapan Renstra	69
Tabel 3.3 Arah Kebijakan.....	71
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	80
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	102
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	118
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan...	121
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	121
Tabel 5.1 Instrumen Monitoring.....	123
Tabel 5.2 Instrumen Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra..	123
Tabel 5.3 Instrumen Evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.	123
Tabel 5.4 Instrumen Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi Renstra	124

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan, 2022-2024	44
Grafik 2.2 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan, 2022-2024.....	45
Grafik 2.3 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai Produksi Ikan, 2022-2024	46
Grafik 2.4 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai SAKIP, 2022-2024	47
Grafik 2.5 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Produksi Ikan Tangkap, 2022-2024	48
Grafik 2.6 Target, Realisasi, dan Persentase Cakupan Pegawasan Kelautan dan Perikanan, 2022-2024	49
Grafik 2.7 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 2022-2024 ..	50
Grafik 2.8 Efektifitas Penyerapan Anggaran 2022-2024	54
Grafik 2.9 Gap Realisasi terhadap Target Anggaran 2022-2024.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	9
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	64
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	65
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	74

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan	125
Lampiran 2 Pohon Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu kekuatan utama yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan garis pantai, kawasan pesisir, perairan umum daratan, serta potensi perikanan budidaya dan tangkap yang melimpah, sektor ini menyimpan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki hamparan mangrove dengan kerapatan sedang hingga tinggi sehingga menjadi bagian penting dari bentang alam pesisir. Keberadaan mangrove ini bukan hanya habitat alami ikan dan biota pesisir, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas perairan, menahan abrasi, dan menjadi penyangga penting dalam menghadapi perubahan iklim.

Namun demikian, potensi besar tersebut tidak serta-merta dapat memberikan manfaat optimal tanpa adanya arah pembangunan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Tantangan seperti degradasi lingkungan pesisir, keterbatasan infrastruktur perikanan, fluktuasi harga komoditas, dan ketimpangan akses terhadap teknologi serta pasar, menjadi isu penting yang harus dijawab secara strategis dan sistematis.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 yang berbunyi Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Penyusunan Renstra ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Juni 2025. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 setelah pelantikan Kepala Daerah dan dilakukan secara bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra juga menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada bidang kelautan dan perikanan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra PD sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
3. Pelaksanaan Foru Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
4. Penyusunan Rancangan Renstra;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan
6. Penetapan Renstra

Setelah Renstra ini ditetapkan, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya. Melalui dokumen ini, Dinas Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat pesisir Kutai Kartanegara.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk memanfaatkan kekuatan wilayah pesisir dan perairan sebagai sumber daya produktif yang berkelanjutan. Upaya pengembangan diarahkan antara lain pada peningkatan kapasitas produksi, efisiensi budidaya, serta peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, sehingga sektor ini dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus menjadi penopang kesejahteraan nelayan dan pembudidaya. Rencana pembangunan jangka menengah di bidang kelautan dan perikanan juga disusun dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan, pelayanan, dan program pembangunan memberikan manfaat yang adil dan setara bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan, perempuan nelayan, penyandang disabilitas, pelaku usaha mikro perikanan, masyarakat adat pesisir, serta kelompok rentan lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 163);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029; dan
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang kelautan dan perikanan bagi para pemangku kepentingan, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 -2029. Dengan dokumen ini, pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yaitu :

1. Mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis bidang kelautan dan perikanan;
3. Menetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan bidang kelautan dan perikanan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan;
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran;
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif;
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Menyiapkan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
8. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Permasalahan Layanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PEMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

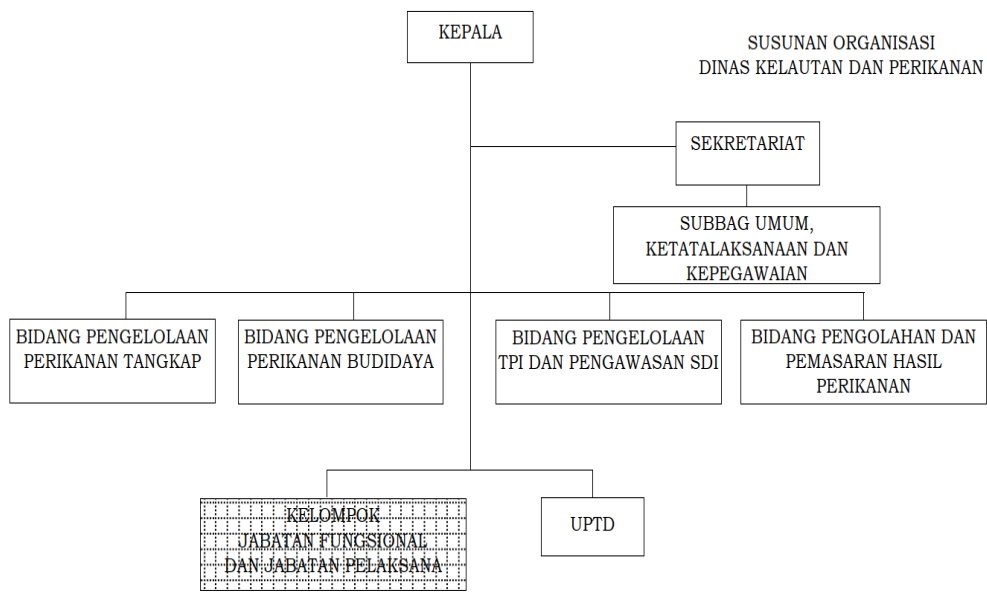
Sebagai implikasi dari reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak tahun 2023 telah diimplementasikan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 2 ayat 1) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (ayat 2).

Susunan organisasi Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pengelolaan TPI dan Pengawasan SDI;
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- h. UPTD.

Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2023 di atas, tugas dan fungsi susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Pasal 2 ayat 2). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas (Pasal 4 ayat 1):

mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi (Pasal 4 ayat 2):

- merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Kelautan dan Perikanan;
- merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang Kelautan dan Perikanan;
- mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Kelautan dan Perikanan;

- d. mengoordinasikan penyusunan laporan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- f. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (Pasal 5 ayat 2). Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas (Pasal 5 ayat 2):

Menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset.

Fungsi (Pasal 5 ayat 3):

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d. mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) administrasi umum Perangkat Daerah;
 - 2) pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 3) penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 4) pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 5) administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 6) perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 8) administrasi keuangan Perangkat Daerah; dan
 - 9) administrasi pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah.
- f. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset Perangkat Daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

3. Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris membawahi Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Subbagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris (Pasal 6 ayat 1). Kepala Subbagian dimaksud memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas (Pasal 6 ayat 2):

Menghimpun dan mengumpulkan data serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Fungsi (Pasal 6 ayat 3):

- 1) melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- 3) melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- 4) menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu dan Pengukuran Kinerja), dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 5) merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
 - a) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

- b) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
- c) fasilitasi kunjungan tamu;
- d) penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
- e) penatausahaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah;
- f) dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Perangkat Daerah;
- g) pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- h) pengadaan alat besar, alat angkutan darat tak bermotor, mebel, peralatan dan mesin lainnya;
- i) pengadaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
- j) pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- k) penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- l) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor;
- m) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional/lapangan;
- n) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar, serta alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;
- o) penyediaan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
- p) penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, serta tanah;
- q) peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
- r) pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;

- s) pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami, Penghargaan, pemberian Sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
 - t) koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
 - u) monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
 - v) pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
 - w) pemindahan tugas pegawai negeri sipil;
 - x) pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
 - y) sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- 6) melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - 7) menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - 8) memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
 - 9) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

4. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (Pasal 7 ayat 1). Kepala Bidang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas (Pasal 7 ayat 2):

Menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengelolaan Penangkapan Ikan pemberdayaan Nelayan dan perijinan Penangkapan Ikan.

Fungsi (Pasal 7 ayat 3):

- 1) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengelolaan Penangkapan Ikan, pemberdayaan Nelayan dan perijinan Penangkapan Ikan;
- 2) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengelolaan Penangkapan Ikan, pemberdayaan Nelayan dan perijinan Penangkapan Ikan;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- 4) mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengelolaan Penangkapan Ikan, pemberdayaan Nelayan dan perijinan Penangkapan Ikan;
- 5) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - a) pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
 - b) pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah;
 - c) penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;

- d) penerbitan izin pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah; dan
- e) pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah.
- f) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g) mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pengelolaan Penangkapan Ikan, pemberdayaan Nelayan dan perijinan Penangkapan Ikan;
- h) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (Pasal 8 ayat 1). Tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagai berikut:

Tugas (Pasal 8 ayat 2):

Menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengelolaan Pembudidayaan Ikan, pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan perijinan Pembudidaya Ikan.

Fungsi Pasal 8 ayat 3):

- 1) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengelolaan Pembudidayaan Ikan, pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan perijinan Pembudidaya Ikan;

- 2) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengelolaan Pembudidayaan Ikan, pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan perijinan Pembudidaya Ikan;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- 4) mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengelolaan Pembudidayaan Ikan, pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan perijinan Pembudidaya Ikan;
- 5) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - a) pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - b) pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - c) penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah; dan
 - d) penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah.
- 6) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- 7) mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pengelolaan Pembudidayaan Ikan, pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan perijinan Pembudidaya Ikan;
- 8) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- 9) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

6. Bidang Pengelolaan TPI dan Pengawasan SDI

Bidang Pengelolaan TPI dan Pengawasan SDI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (Pasal 9 ayat 1). Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan TPI dan Pengawasan SDI sebagai berikut:

Tugas (Pasal 9 ayat 2):

Menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengawasan Pembudidayaan Ikan, pengawasan Penangkapan Ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.

Fungsi (Pasal 9 ayat 3):

- 1) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengawasan Pembudidayaan Ikan, pengawasan Penangkapan Ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- 2) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengawasan Pembudidayaan Ikan, pengawasan Penangkapan Ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- 4) mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan pengawasan Pembudidayaan Ikan, pengawasan Penangkapan Ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- 5) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :

- a) pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah; dan
 - b) pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.
- 6) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pengelolaan TPI dan Pengawasan SDI yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip);
 - 7) mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pengawasan Pembudidayaan Ikan, pengawasan Penangkapan Ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - 8) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - 9) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

7. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (Pasal 10 ayat 1). Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai berikut.

Tugas (Pasal 9 ayat 2):

Menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan perijinan usaha pengolahan hasil Perikanan, pembinaan dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan serta pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.

Fungsi (Pasal 9 ayat 3):

- 1) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan perijinan usaha pengolahan hasil Perikanan, pembinaan dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan serta pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
- 2) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan perijinan usaha pengolahan hasil Perikanan, pembinaan dan informasi pengolahan dan pemasaran

- hasil Perikanan serta pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
 - 4) mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan perijinan usaha pengolahan hasil Perikanan, pembinaan dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan serta pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - 5) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
 - a) penerbitan Tanda Daftar Usaha pengolahan hasil Perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - b) pembinaan mutu dan keamanan hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; dan
 - c) penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah.
 - 6) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - 7) mengoordinasikan penyusunan laporan urusan perijinan usaha pengolahan hasil Perikanan, pembinaan dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan serta pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;

- 8) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - 9) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (Pasal 11 ayat 1). Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan (Pasal 11 ayat 2).
- Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 ayat 3).
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD (Pasal 12 ayat). Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, perangkat daerah memerlukan berbagai sumber daya yang saling mendukung, antara lain sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan teknologi. sumber daya ini sangat penting untuk (1) meningkatkan kinerja perangkat daerah, (2) mendukung keberhasilan program pembangunan daerah, (3) memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang berkualitas.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Gambaran sumber daya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2025

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
Strata 3	0	0	0	0
Strata 2	2	0	2	1,44
Strata 1	47	32	79	56,83
Diploma 3	1	1	2	1,44
SMA/Sederajat	33	17	50	35,97
SMP/Sederajat	4	0	4	2,88
SD/Sederajat	2	0	2	1,44
Jumlah	89	50	139	100

Sumber: SIMPEG per 01 September 2025

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar pegawai (56,83%) memiliki pendidikan S1, yang menunjukkan bahwa posisi-posisi yang ada di dinas ini lebih banyak memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan sarjana. Hanya 1,44% pegawai yang memiliki pendidikan S2. Ini menunjukkan bahwa peran yang memerlukan pendidikan pascasarjana sangat sedikit.

Terdapat 35,97% pegawai dengan pendidikan SMA, yang cukup signifikan. Hal ini mungkin menggambarkan bahwa banyak posisi yang lebih mengutamakan keterampilan praktis dan pengelolaan lapangan, seperti pekerjaan teknis dan administratif. Selain itu, masih ada 2,88% pegawai dengan pendidikan SMP dan 1,44% dengan pendidikan SD, yang menunjukkan adanya pekerjaan dengan kebutuhan keterampilan dasar atau pekerjaan manual.

Data tersebut menunjukkan adanya implikasi untuk pengembangan SDM. Dengan banyaknya pegawai yang memiliki pendidikan SMA/Sederajat, penting bagi dinas ini untuk memperhatikan pelatihan dan pengembangan agar para pegawai dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, terutama yang ada di tingkat pendidikan menengah.

Kondisi pegawai lebih banyak berpendidikan S1 dan D3 menunjukkan bahwa posisi yang ada lebih banyak yang membutuhkan keterampilan teknis atau administratif yang lebih tinggi daripada pekerjaan lapangan yang hanya memerlukan pendidikan menengah. Meskipun hanya sedikit yang memiliki pendidikan S2, jika ada kebutuhan untuk kebijakan, penelitian, atau pengelolaan program yang lebih kompleks, penting untuk

mempertimbangkan pendidikan pascasarjana untuk memperkuat kapasitas pengambilan keputusan dan analisis.

Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan, 2025

No	Pangkat dan Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Pembina Muda Utama-Gol. IV/c	1	0	1	0,72
2	Pembina Tk. I - Gol IV/b	1	0	1	0,72
3	Pembina-Gol. IV/a	2	0	2	1,43
4	Penata Tk. I - Gol. III/d	26	16	42	30,22
5	Penata - Gol. III/c	0	0	0	0,00
6	Penata Muda Tk. I - Gol III/b	5	2	7	5,04
7	Penata Muda Tk. I - Gol III/a	5	3	8	5,76
8	Pengatur Tk. I-Gol. II/d	13	11	24	17,27
9	Pengatur - Gol II/c	3	0	3	2,16
10	Pengatur Muda Tk. I - Gol II/b	1	0	1	0,72
11	Pengatur Muda - Gol II/a	2	0	2	1,43
12	Juru Tk I-Gol. I/d	0	0	0	0,00
13	Juru Gol. I/c	0	0	0	0,00
14	Juru Muda Tk. I-Gol. I/b	0	0	0	0,00
15	Juru Muda Gol. I/a	0	0	0	0,00
16	PPPK	29	19	48	34,53
	Jumlah	88	51	139	100,0

Sumber: SIMPEG per 01 September 2025

Berdasarkan pangkat dan golongan, persentase pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi cukup kecil, hanya 4 pegawai (2,88%) dari total pegawai (0,72% untuk Golongan IV/c, 0,72% untuk IV/b, dan 1,43% untuk IV/a). Pegawai dengan golongan IV merupakan pangkat tinggi dalam sistem kepegawaian, yang biasanya mencakup jabatan struktural yang lebih senior. Sangat sedikit pegawai yang menduduki golongan IV, menggambarkan bahwa dinas ini belum memiliki banyak jabatan struktural tinggi atau mungkin hanya ada sedikit jabatan eselon yang membutuhkan pegawai di golongan ini.

Sebagian besar pegawai (41,01%) berada di golongan III, yang merupakan golongan menengah dan sering kali mencakup pegawai yang mengemban tugas administratif dan teknis yang cukup kompleks. Banyaknya pegawai di golongan III menunjukkan bahwa dinas ini lebih

banyak memerlukan pegawai dengan kompetensi teknis di tingkat menengah untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan operasional.

Secara keseluruhan, hampir 21,58% pegawai berada di golongan II, yang mencakup banyak pegawai dengan kompetensi teknis dasar atau yang bekerja dalam peran administratif dan operasional. Banyaknya pegawai di golongan II ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan tinggi untuk tenaga teknis, administratif, atau pelaksana lapangan yang langsung terlibat dalam kegiatan operasional dinas.

Pegawai dengan golongan I biasanya memiliki tugas yang lebih praktis atau rutin, dan sering kali terlibat dalam pekerjaan lapangan atau tugas operasional. Jumlah yang relatif kecil menunjukkan bahwa sebagian besar tugas dalam dinas ini sudah dilaksanakan oleh pegawai dengan golongan yang lebih tinggi, meskipun masih ada beberapa yang berada pada tingkat pelaksana dengan tugas dasar.

Tabel 2.3 Jumlah dan Persentase Pegawai Jabatan, 2025

No	Jabatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Struktural:				
	1.1. Eselon II	1	0	1	0,72
	1.2. Eselon III	3	0	3	2,16
	1.3. Eselon IV	4	2	6	4,32
2	Fungsional	8	2	10	7,19
3	Pelaksana	72	47	119	85,61
	Jumlah	88	51	139	100,0

Sumber: SIMPEG per 01 September 2025

Sedangkan ditinjau berdasarkan jabatan, total jabatan struktural (Eselon II, III, dan IV) berjumlah 10 orang, yang menyumbang sekitar 7,19% dari total pegawai (139 orang). Eselon II (1 orang, 0,72%) merupakan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi pemerintahan, dan biasanya berperan sebagai kepala dinas atau pejabat tinggi lainnya. Hanya ada satu orang yang menduduki jabatan ini, yang mengindikasikan bahwa posisi kepemimpinan tingkat tinggi sangat terbatas di dinas ini.

Eselon III (3 orang, 2,16%) biasanya melibatkan pejabat yang memimpin sub-bagian atau bagian tertentu, yang memiliki peran manajerial tingkat menengah. Persentasenya masih relatif kecil, yang menunjukkan keterbatasan jumlah pejabat menengah yang mengatur program-program penting atau memimpin tim di tingkat operasional.

Eselon IV (6 orang, 4,32%) mencakup pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas administratif dan operasional yang lebih spesifik, namun dengan jabatan yang masih cukup strategis untuk mengkoordinasi beberapa bagian dalam unit kerja. Meskipun persentasenya lebih tinggi dibandingkan Eselon II dan III, jumlahnya masih relatif terbatas untuk ukuran organisasi yang lebih besar.

Pegawai di jabatan fungsional dan pelaksana terdiri dari 92.80% dari total pegawai. Jabatan fungsional dan pelaksana adalah jabatan yang lebih bersifat teknis, operasional, dan pelaksana, yang biasanya diisi oleh pegawai dengan kompetensi tertentu yang memiliki tugas spesifik sesuai keahlian mereka. Jumlah Pegawai Fungsional dan pelaksana yang Tinggi (92,80%) menunjukkan bahwa sebagian besar tugas di Dinas Kelautan dan Perikanan lebih banyak diisi oleh pegawai yang terlibat dalam aktivitas teknis dan operasional seperti pengawasan, penelitian, konservasi, atau pelayanan masyarakat.

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 6 jenis utama meliputi: (1) Tanah dan bangunan; (2) Kendaraan bermotor; (3) Peralatan kantor; (4) Peralatan mesin; (5) Peralatan ukur dan (7) Meubelair. Adapun jenis jenis, jumlah dan satuan, tahun perolehan serta kondisi aset disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.4 Daftar Aset

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
A.	TANAH DAN BANGUNAN				
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.967	M ²	2005	Baik, 3 lokasi
2.	Tanah			2008- 2022	Baik
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Dinas Perikanan, Kantor UPT Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Satelite Station Bumi, Kantor Reservat, TPI)	12	Unit	2002-2013	Baik
4.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2	Unit	2005	Baik
5.	Rumah Negara	1	Unit	2005	Baik
6.	Pos Pengawasan	5	Unit	2014-2015	Baik

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
B.	KENDARAAN BERMOTOR				
1.	Kendaraan Roda 4 (Station Wagon)	3	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		6	Unit	2023	Baik
2.	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2016	Baik
3.	Sepeda Motor	4	Unit	2006	Baik
		8	Unit	2007	Baik
		29	Unit	2008	Baik
		6	Unit	2010	Baik
		4	Unit	2011	Baik
		8	Unit	2013	Baik
		8	Unit	2023	Baik
4.	Kapal Motor	1	Unit	2007	Baik
		12	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2009	Rusak Berat
		4	Unit	2009	Baik
5.	Speed Boat	1	Unit	2007	Kurang Baik
		2	Unit	2023	Baik
		3	Unit	2024	Baik
6.	Alat Pengolahan	1	Unit	2005	Kurang Baik
		4	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2010	Baik
7.	Motor Boat	5	Unit	2007	Baik
		2	Unit	2013	Baik
8.	Kapal Penangkap Ikan	1	Unit	2009	Rusak Berat
		1	Unit	2009	Baik
		2	Unit	2010	Baik
C.	PERALATAN KANTOR				
1.	Laptop	2	Unit	2006	Rusak Berat
		1	Unit	2009	Rusak Berat
		2	Unit	2009	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		2	Unit	2011	Rusak Berat
		10	Unit	2020	Baik
		30	Unit	2023	Baik
		18	Unit	2024	Baik
2.	Note Book	3	Unit	2007	Rusak Berat

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
		7	Unit	2007	Baik
		12	Unit	2008	Rusak Berat
		5	Unit	2008	Baik
		12	Unit	2010	Rusak Berat
		21	Unit	2010	Baik
		1	Unit	2013	Rusak Berat
		2	Unit	2013	Baik
3.	Personal Computer	4	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2014	Baik
		18	Unit	2019	Baik
		18	Unit	2020	Baik
		3	Unit	2022	Baik
		37	Unit	2023	Baik
		14	Unit	2023	Baik
4.	Printer	2	Unit	2006	Kurang Baik
		1	Unit	2007	Baik
		3	Unit	2010	Rusak Berat
		5	Unit	2010	Baik
		1	Unit	2011	Rusak Berat
		5	Unit	2011	Baik
		5	Unit	2013	Rusak Berat
		2	Unit	2013	Baik
		11	Unit	2014	Baik
		17	Unit	2020	Baik
		2	Unit	2022	Baik
		39	Unit	2023	Baik
		35	Unit	2024	Baik
5.	Scanner	1	Unit	2006	Kurang Baik
		1	Unit	2019	Baik
		2	Unit	2020	Baik
		2	Unit	2021	Baik
		3	Unit	2023	Baik
		9	Unit	2024	Baik
6.	GPS	1	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2019	Baik
7.	Proyektor/Infocus	1	Unit	2010	Baik
		1	Unit	2014	Baik
		1	Unit	2019	Baik
		1	Unit	2022	Baik
		2	Unit	2023	Baik

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
		3	Unit	2024	Baik
8.	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	2008	Baik
		2	Unit	2012	Baik
9.	Mesin Ketik	1	Unit	2007	Baik
		4	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Rusak Berat
		2	Unit	2011	Baik
		4	Unit	2023	Baik
10.	Mesin Ketik Listrik	1	Unit	2008	Baik
		4	Unit	2012	Baik
		17	Unit	2013	Baik
11.	Peralatan Studio Audio	1	Unit	2006	Kurang Baik
		1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2011	Baik
12.	Kamera	1	Unit	2008	Rusak Berat
		1	Unit	2009	Rusak Berat
		3	Unit	2010	Rusak Berat
		4	Unit	2010	Baik
		6	Unit	2013	Rusak Berat
		10	Unit	2013	Baik
		2	Unit	2022	Baik
13.	Handy Cam	1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2010	Baik
14.	UPS	1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2009	Baik
		3	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		2	Unit	2014	Baik
		18	Unit	2019	Baik
		19	Unit	2020	Baik
15.	Telephone	2	Unit	2008	Rusak Berat
		7	Unit	2008	Baik
16.	Air Conditioner (AC)	1	Unit	2009	Rusak Berat
		4	Unit	2010	Rusak Berat
		1	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		3	Unit	2018	Baik

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
		7	Unit	2020	Baik
		3	Unit	2023	Baik
		6	Unit	2024	Baik
17.	Kipas Angin	1	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		11	Unit	2012	Baik
		6	Unit	2013	Baik
		6	Unit	2024	Baik
18.	Mesin Absensi	1	Unit	2013	Baik
		1	Unit	2014	Baik
D.	PERALATAN MESIN				
1.	Alat Pengolahan Lainnya	1	Unit	2005	Kurang Baik
		4	Unit	2006	Baik
		1	Unit	2007	Baik
		1	Unit	2010	Baik
2.	Compressor High Pressure	3	Unit	2024	Baik
3.	Genset	2	Unit	2010	Baik
4.	Mesin Pembuat Pakan	1	Unit	2010	Baik
5.	Mesin Pemotong Rumput	7	Unit	2023	Baik
E.	PERALATAN UKUR				
1.	PH Meter (Alat Ukur Universal)	5	Unit	2022	Baik
2.	Fish Finder	1	Unit	2006	Baik
		8	Unit	2009	Baik
		1	Unit	2010	Baik
3.	Alat Selam	1	Unit	2009	Baik
4.	Alat Pemadam	2	Unit	2010	Baik
		7	Unit	2013	Baik
		6	Unit	2024	Baik
F.	MEUBELAIR				
1.	Filling Besi – Kayu	1	Unit	2008	Baik
		1	Unit	2010	Baik
		2	Unit	2012	Baik
		2	Unit	2014	Baik
		9	Unit	2020	Baik
		10	Unit	2021	Baik
2.	Lemari Kayu	1	Unit	2008	Baik
3.	Lemari Arsip	17	Unit	2013	Baik
		1	Unit	2019	Baik
		4	Unit	2020	Baik

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
4.	Meja Kerja	1	Unit	2008	Baik
		2	Unit	2011	Baik
		12	Unit	2012	Baik
		42	Unit	2013	Baik
		1	Unit	2018	Baik
		78	Unit	2019	Baik
		5	Unit	2020	Baik
		9	Unit	2024	Baik
5.	Meja Rapat	1	Unit	2010	Baik
		1	Unit	2011	Baik
		3	Unit	2020	Baik
6.	Kursi Rapat	1	Unit	2008	Baik
		25	Unit	2011	Baik
7.	Kursi Tamu	10	Unit	2009	Baik
		11	Unit	2013	Baik
		2	Unit	2023	Baik
8.	Kursi Lipat	50	Unit	2009	Baik
		6	Unit	2010	Baik
9.	Bangku Tunggu	2	Unit	2010	Baik
		3	Unit	2019	Baik
		2	Unit	2020	Baik
		6	Unit	2024	Baik

Berdasarkan data di atas beberapa permasalahan terkait dengan aset:

(1) Keterbatasan Peralatan dan Teknologi Terbaru: Beberapa peralatan kantor sudah usang, terutama yang digunakan untuk kegiatan pengolahan data, seperti laptop dan komputer, yang mempengaruhi produktivitas pegawai.

(2) Ketergantungan pada Mesin yang Spesifik: Terdapat ketergantungan pada beberapa mesin yang sangat spesifik untuk kegiatan tertentu. Jika salah satu mesin mengalami kerusakan, dapat mengganggu kelancaran operasi perikanan atau pengolahan.

(3) Penyebaran lokasi penggunaan mesin: Beberapa peralatan memiliki distribusi yang kurang merata antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, misalnya antara pos pengawasan dengan kantor utama.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan sektor kelautan dan perikanan daerah. Penguatan tata kelola, peningkatan efektivitas program, serta kualitas layanan kepada masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan menjadi fokus utama dinas dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk melihat capaian tersebut secara lebih terukur, berikut disajikan tabel kinerja pelayanan yang memuat indikator utama, target, dan realisasi pada periode pelaporan. Penyajian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana program dan layanan yang dilaksanakan mampu mencapai sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kutai Kartanegara.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Indikator Tujuan & Sasaran:											
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan	Persen	10	12,5	13	-27,26	76.57	20.02	-272,6	612,56	154,00
2	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan.	Nilai	101,5	102	103	99,9	104,3	103,01	98,42	102,25	100,01
3	Nilai Produksi Perikanan	Milyar Rp	7.386	8.310	9.390	6.995	10.523	12.622	94,71	126,63	134,42
Indikator Program:											
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	85	85	85,9	85	74	69,82	100	87,06	81,28
2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	82.400	86.520	121.670	81.688	98.397	121.670	99,14	113,73	100,00
3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	150.656	165.721	185.608	127.670	191.122,52	208.073	84,74	115,33	112,10
4	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan yang Diawasi	Kecamat an	5	20	20	5	20	20	100,00	100,00	100,00
5	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	22.762	23.900	25.095	15.992	60.370	95.598	70,26	252,59	380,94
Indikator Kegiatan:											
1	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	6	3	3	4	3	3	66,67	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Jumlah Dokumen Laporan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	22	21	21	22	21	21	100	100	100
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	1	2	6	1	2	100	100	100
4	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	100	100
5	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	2	3	3	2	3	100	100	100
6	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Memanfaatkan Layanan	ASN	110	110	110	110	110	110	100	100	100
7	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	Unit	0	4	0	0	4	0	0	100	0
8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Laporan	3	3	3	3	3	3	100	100	100
9	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan	Unit	90	90	90	90	90	90	100	100	100
10	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Nelayan	2728	1870	1870	2580	5285	2814	94,57	282,62	150,48
11	Jumlah KUB Naik Kelas	KUB	5	8	8	5	3	8	100	37,50	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Orang	720	500	400	510	1730	405	70,83	346	101,25
13	Jumlah TPI Beroperasi	Unit	1	1	2	0	1	2	0	100	100
14	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	Tanda Daftar Kapal Perikanan	650	1500	5000	374	1000	1000	57,54	66,67	20
15	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	Kapal	0	1500	2000	0	1500	1000	0	100	50
16	Jumlah POKDAKAN Bermitra	Pokdakan	20	20	100	20	20	105	100	100	105
17	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	TDPI	200	1000	1000	200	212	568	100	21,20	56,80
18	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Pembudidaya	2070	1130	1908	2952	8848	10228	142,61	783	536
19	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi	POKMASWAS	2	3	3	2	3	3	100	100	100
20	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	Tanda Daftar Usaha	10	10	10	10	10	10	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	Unit Usaha	5	15	5	3	15	5	60	100	100
22	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran	POKLAHSAR	5	25	25	5	25	150	100	100	600
Indikator Sub Kegiatan:											
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	1	2	2	1	100	100	100
2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	0	1	1	0	1	100	0	100
3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	100	100
4	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	120	120	120	120	99	120	100	82,50	100
5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	3	3	3	3	3	100	100	100
6	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	18	18	18	18	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	0	1	1	0	1	100	0	100
8	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	100	100
9	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	1	1	0	1	100	0	100
10	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	1	0	0	100	0	0
11	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	0	0	3	0	0	100	0	0
12	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	100	100	100
13	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	1	0	0	100	0	0
14	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	100	100
15	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	1	0	0	100	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	10	50	10	10	50	100	100	100
17	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	100	100	100
18	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	32	1	1	32	100	100	100
19	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	25	1	1	25	100	100	100
20	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	10	1	1	10	100	100	100
21	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2184	3222	1	2184	3222	100	100	100
22	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Laporan	0	1	1	0	1	1	0	100	100
23	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	30	30	45	30	30	100	100	100
24	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	6	1	1	6	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	7	2	0	7	2	0	100	100
26	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Disediakan	Unit	0	6	0	0	6	0	0	100	0
27	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	6	0	0	6	0	0	100	0
28	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	0	2	0	0	2	0	0	100	0
29	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	0	0	2	0	0	100	0
30	Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	0	0	2	0	0	100	0
31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	12	1	1	12	100	100	100
32	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	12	1	1	12	100	100	100
33	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	64	1	1	64	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23	23	23	23	23	23	100	100	100
35	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	19	19	19	19	19	100	100	100
36	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	3	2	2	3	2	100	100	100
37	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	5	3	2	5	3	100	100	100
38	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	100	100	100
39	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	2	7	1	2	7	100	100	100
40	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	8	5	1	8	5	100	100	100
41	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	3048	2220	2450	2840	8130	4690	93,18	366,22	191,43
42	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	1220	768	1824	1010	1746	1824	82,79	227,34	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
43	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	KUB	100	100	100	67	100	50	67	100	50
44	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	0	100	350	0	100	100	0	100	28,57
45	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	3	3	0	1	3	0	33,33	100	0
46	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	1	0	1	1	0	100	100
47	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Data Rekomendasi	650	1500	5000	374	1500	1000	57,54	100	20
48	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	0	0	1	0	0	100	0
49	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Kapal	0	1500	0	0	1500	0	0	100	0
50	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	12	15	35	10	18	30	83,33	120	85,71

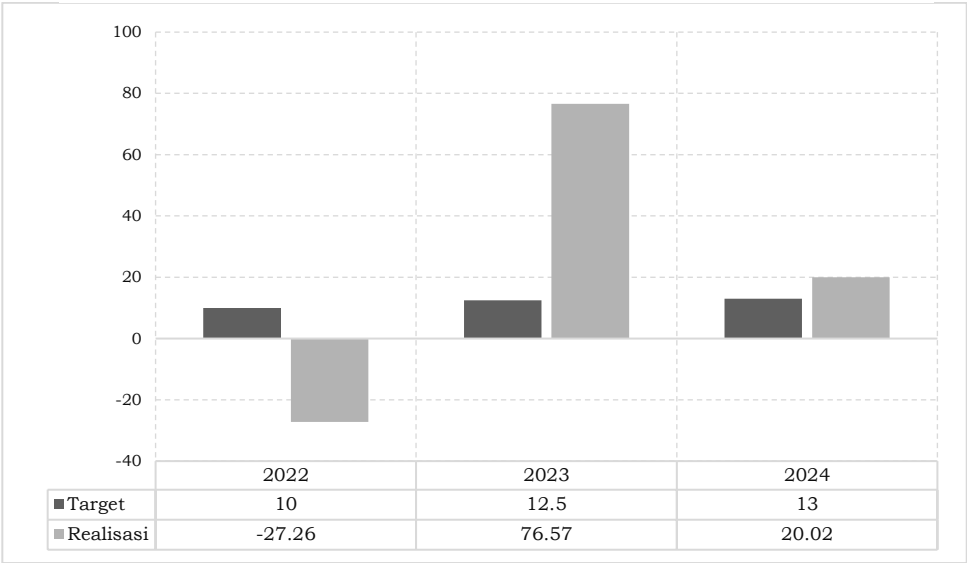
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	100	100	100	52	100	87	52	100	87
52	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	0	30	200	0	30	139	0	100	69,50
53	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	10	46	100	10	46	30	100	100	30
54	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanda Daftar	200	1000	2000	200	212	568	100	21,20	28,40
55	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	100	100
56	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	35	100	1	35	94	100	100	94
57	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2060	2520	575	3240	13400	575	157,28	531,75	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
58	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	0	1	1	0	1	1	0	100	100
59	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Hektar	100	100	0	100	100	0	100	100	0
60	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	1	1	34	100	100	34
61	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	100	100
62	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	100	100	100
63	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	10	15	15	10	15	15	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
64	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	50	50	50	50	50	50	100	100	100
65	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	480	225	80	480	115	50	100	51,11	62,50

Sumber: Hasil Evaluasi Renja PD tahun 2022-2024

Grafik 2.1 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan, 2022-2024



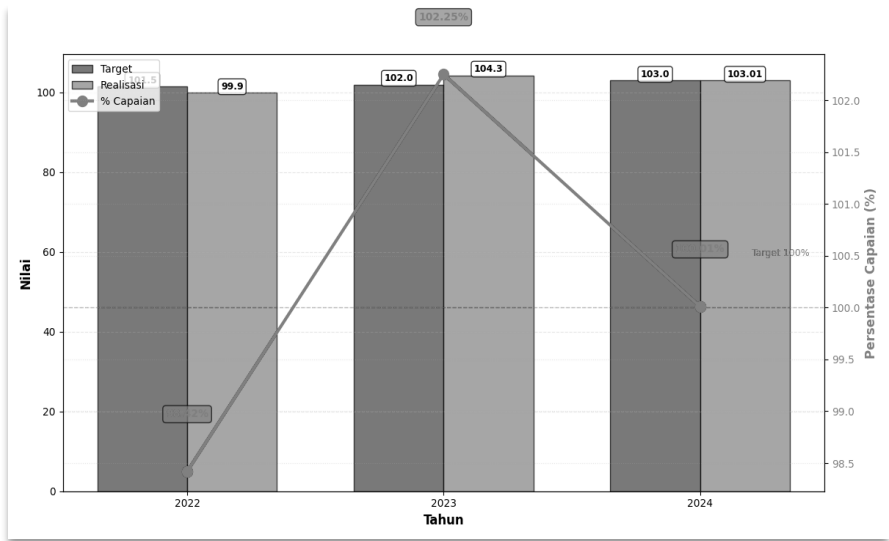
Sumber: LKJIP DKP, data diolah

Berdasarkan Tabel di atas, kinerja sektor kelautan dan perikanan dalam dua tahun terakhir (2023–2024) menunjukkan tren peningkatan yang cukup Signifikan, terutama pada level sasaran (*outcome*). Pertumbuhan PDRB sektor kelautan dan perikanan berhasil melampaui target selama dua tahun berturut-turut, dengan capaian yang terus meningkat dari -272,6 persen pada 2022 menjadi 154 persen pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah semakin menguat dan menunjukkan daya tumbuh yang stabil.

Capaian tinggi dalam penyediaan benih, pakan, keramba, kapal, dan alat tangkap (banyak di atas 100%) memungkinkan peningkatan produksi yang masif. Pelatihan dan pendampingan kepada nelayan dan pembudidaya meningkatkan produktivitas mereka, yang berdampak pada peningkatan output.

Fasilitasi *cold storage (freezer, cool box)*, bimbingan mutu, dan pameran membantu produk memiliki nilai jual lebih tinggi dan pasar yang lebih luas, yang meningkatkan nilai produksi secara keseluruhan.

Grafik 2.2 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan, 2022-2024



Sumber: LKJIP DKP, data diolah

Indikator Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan juga mengalami perbaikan signifikan. Meskipun pada tahun 2022 masih berada di bawah target (98,42 persen), indikator ini menunjukkan peningkatan pada 2023 dan mencapai sedikit di atas target pada 2024 (100,01 persen). Hal ini menandakan adanya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, termasuk membaiknya posisi mereka dalam rantai nilai.

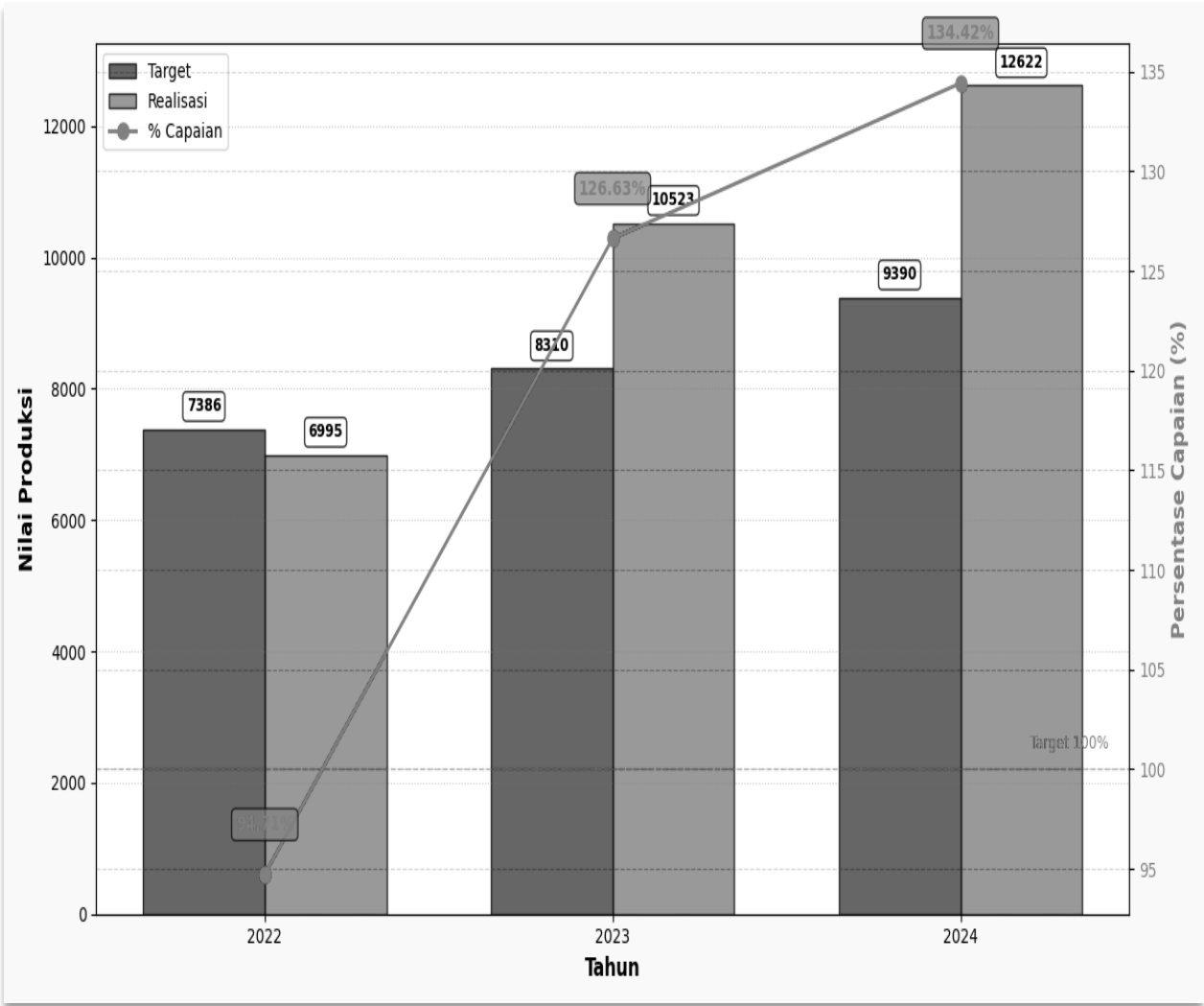
Kegiatan yang meningkatkan hasil tangkapan/budidaya (penyediaan sarana) meningkatkan volume penjualan. Fasilitasi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang idealnya berfungsi akan menciptakan harga yang transparan dan kompetitif, namun capaian 0% untuk layanan TPI di 2023 adalah titik lemah yang dapat menghambat peningkatan NTN.

Kegiatan Subsidi BBM dan Subsidi Pakan secara langsung meringankan beban biaya terbesar nelayan/pembudidaya. Kegiatan Bimbingan Teknis dapat mengajarkan efisiensi biaya produksi.

Pencapaian NTN/NTPi yang diduga kuat dipengaruhi oleh kinerja buruk pada kegiatan-kegiatan penunjang harga jual, seperti tidak berfungsinya layanan TPI. Peningkatan di 2023-2024 mungkin didorong oleh subsidi dan peningkatan produksi, namun potensi peningkatan yang lebih besar terhambat oleh lemahnya sistem pemasaran.

Semua kegiatan yang berhasil menyediakan sarana prasarana produksi (benih, pakan, kapal, dll) adalah penyebab langsung melonjaknya nilai produksi. Capaian yang fantastis pada indikator-indikator ini (misalnya, benih udang 287%, pakan ikan 133.6%) secara matematis menjelaskan mengapa nilai produksi bisa jauh melampaui target. Kegiatan di Program Pengolahan dan Pemasaran memastikan hasil produksi yang tinggi tersebut tidak terbuang dan memiliki nilai jual yang tinggi.

Grafik 2.3 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian
Nilai Produksi Ikan, 2022-2024

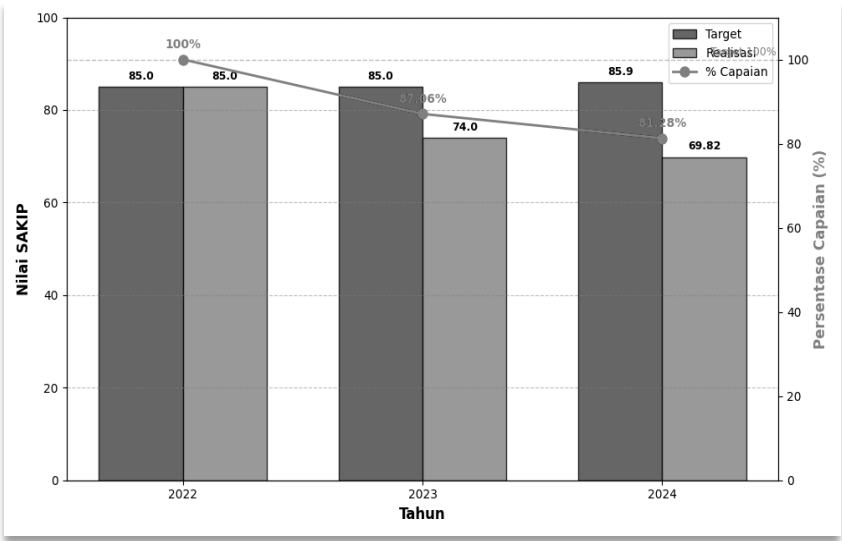


Sumber: LKJIP DKP, data diolah

Pada sisi lain, nilai produksi perikanan mencatat kinerja luar biasa, terutama pada 2023 dan 2024. Setelah sempat berada di bawah target pada 2022 (94,71 persen), capaian meningkat tajam menjadi 126,63 persen pada 2023 dan 134,42 persen pada 2024, memperlihatkan adanya ekspansi produksi yang besar dan potensi peningkatan harga atau permintaan pasar.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, capaian kegiatan secara umum sangat tinggi, terutama pada penyediaan sarana-prasarana, penyediaan data, peningkatan kapasitas pembudidaya, dan fasilitasi pembiayaan. Capaian yang tinggi ini berkontribusi langsung pada lompatan indikator produksi perikanan budidaya yang melampaui target secara signifikan pada 2023 dan 2024. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang masih rendah, seperti penerbitan TDPIK pada tahun tertentu, yang mengindikasikan perlunya perbaikan aspek pelayanan perizinan dan penertiban administrasi usaha kecil.

Grafik 2.4 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Nilai SAKIP, 2022-2024

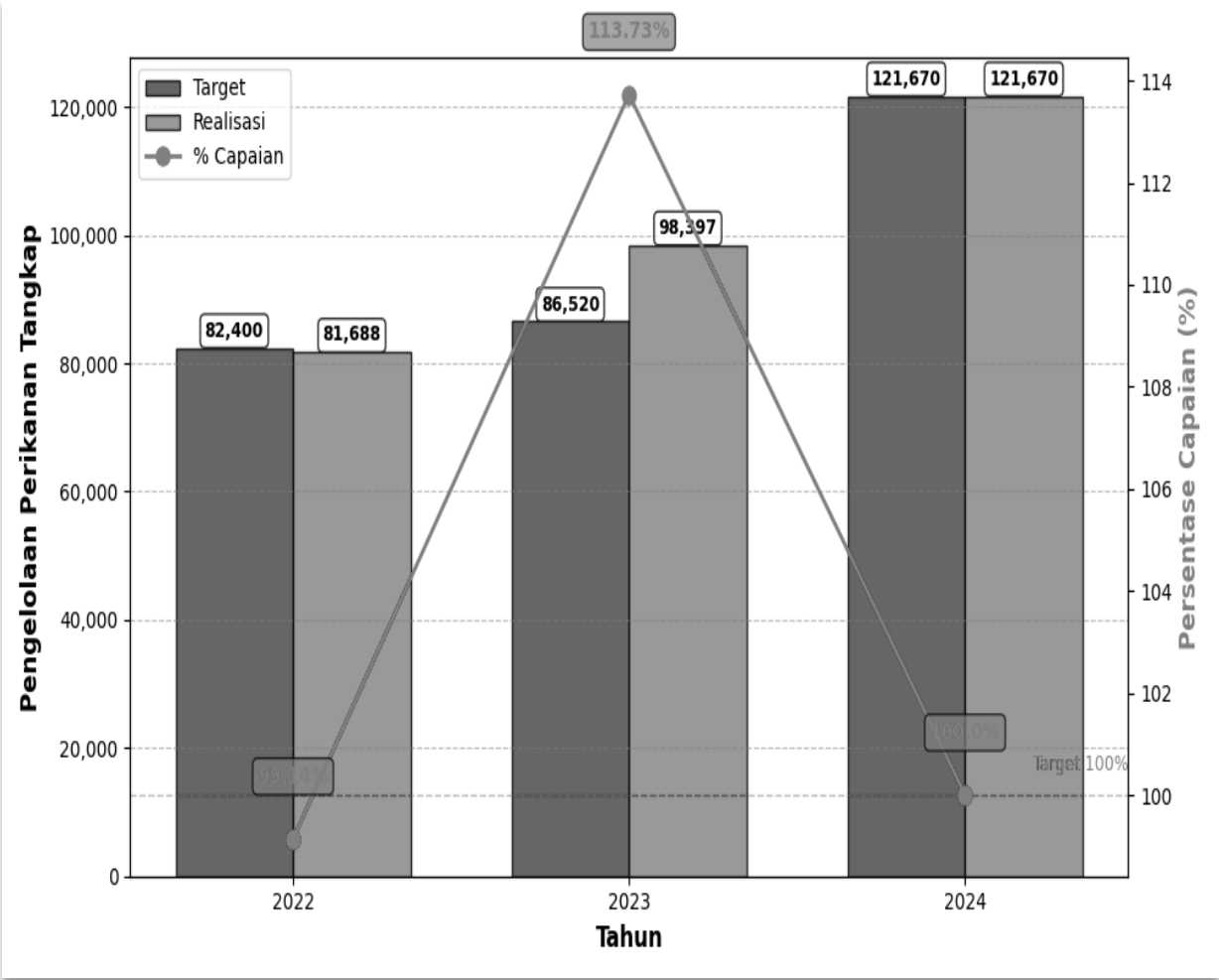


Sumber: LKjIP DKP, data diolah

Pada level program, kinerja menunjukkan variasi yang lebih beragam. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan (Nilai SAKIP). Jika pada 2022 kinerjanya masih mencapai target penuh, pada 2023 capaian turun menjadi 87,06 persen dan kembali merosot menjadi 81,28 persen pada 2024. Tren ini menandakan adanya tantangan dalam penguatan tata kelola, perbaikan perencanaan, maupun kualitas pelaporan kinerja.

Sebaliknya, program inti seperti Pengelolaan Perikanan Tangkap serta Pengelolaan Perikanan Budidaya menunjukkan performa yang solid dan bahkan sangat baik pada 2023 dan 2024. Program tangkap berhasil mencapai target secara stabil, sementara program budidaya membukukan capaian yang melampaui target dalam dua tahun terakhir, menandakan adanya perkembangan pesat di subsektor budidaya.

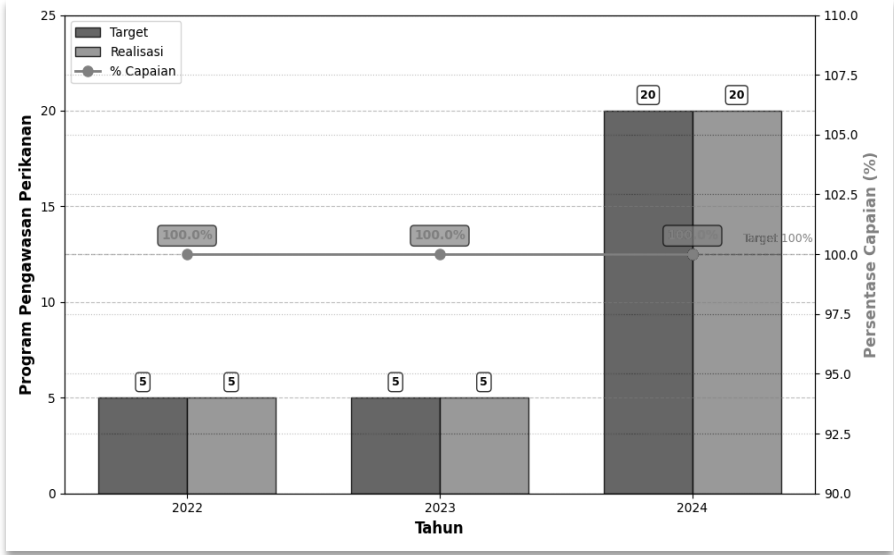
Grafik 2.5 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Produksi Ikan Tangkap, 2022-2024



Sumber: LKjIP DKP, data diolah

Pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, capaian kegiatan secara umum sangat tinggi, terutama pada penyediaan sarana-prasarana, penyediaan data, peningkatan kapasitas pembudidaya, dan fasilitasi pembiayaan. Capaian yang tinggi ini berkontribusi langsung pada lompatan indikator produksi perikanan budidaya yang melampaui target secara signifikan pada 2023 dan 2024. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang masih rendah, seperti penerbitan TDPIK pada tahun tertentu, yang mengindikasikan perlunya perbaikan aspek pelayanan perizinan dan penertiban administrasi usaha kecil.

Grafik 2.6 Target, Realisasi, dan Persentase Cakupan Pegawasan Kelautan dan Perikanan, 2022-2024

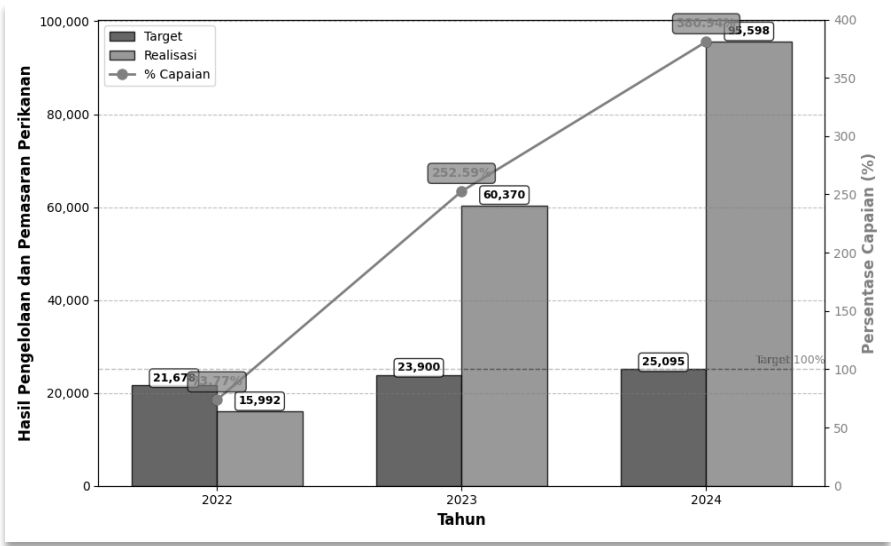


Sumber: LKJiP DKP, data diolah

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tampil konsisten dengan capaian penuh 100 persen selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sudah berjalan efektif sesuai kapasitas yang direncanakan.

Pada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, peningkatan capaian kegiatan dari tahun 2022 ke 2023 mencerminkan penguatan fungsi pengawasan pada usaha perikanan tangkap dan budidaya. Peningkatan ini turut mendukung stabilitas keberlanjutan sumber daya ikan dan keamanan usaha, yang merupakan prasyarat bagi pencapaian produksi perikanan yang meningkat.

Grafik 2.7 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 2022-2024



Sumber: LKjIP DKP, data diolah

Sementara itu, program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan jauh melampaui target, terutama dalam dua tahun terakhir. Capaian yang melonjak dari 73,77 persen pada 2022 menjadi 252,59 persen pada 2023, dan bahkan 380,94 persen pada 2024, menunjukkan peningkatan output yang sangat besar, meskipun capaian yang ekstrem ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan konsistensi data, metode penghitungan, dan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menunjukkan performa kegiatan yang konsisten tinggi, terutama pada penyediaan data, pembinaan mutu, dan fasilitasi bahan baku industri. Capaian ini selaras dengan peningkatan nilai produksi dan nilai tambah pada subsektor pengolahan, sebagaimana tergambar dalam indikator program yang menunjukkan peningkatan signifikan pada 2023 dan 2024. Peningkatan ini juga mendukung arah kebijakan hilirisasi dan industrialisasi sektor unggulan daerah.

Secara keseluruhan, performa sektor kelautan dan perikanan menunjukkan arah yang positif, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi sektor, peningkatan nilai produksi, dan perbaikan kesejahteraan pelaku perikanan. Namun demikian, beberapa aspek tetap memerlukan perhatian khusus. Penurunan kualitas tata kelola yang tercermin dari capaian SAKIP menjadi isu mendasar yang perlu segera ditangani agar sustainability kinerja dapat dijaga. Sementara itu, lonjakan capaian pada program-program produktif perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk memastikan bahwa

peningkatan tersebut tidak hanya bersifat situasional, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kapasitas dan nilai tambah sektor secara berkelanjutan.

Capaian kinerja kegiatan DKP selama periode 2022–2024 menunjukkan tingkat realisasi yang relatif tinggi pada seluruh kelompok program, dengan rerata berada di atas 90 persen. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, seluruh kegiatan perencanaan, pelaporan, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah tercapai hampir sempurna. Konsistensi ini menunjukkan bahwa tata kelola internal, termasuk penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, pengelolaan kepegawaian, penyediaan sarana kantor, serta pemeliharaan aset, berjalan efektif dan mendukung stabilitas manajemen organisasi. Meskipun tidak berdampak langsung pada output sektor perikanan, kinerja administratif yang kuat ini menjadi fondasi bagi tercapainya indikator program, seperti stabilitas nilai SAKIP yang meskipun menurun pada 2023–2024, tetap berada dalam kategori baik.

2.1.3.2. Kinerja Anggaran

Tabel kinerja anggaran berikut menyajikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perencanaan dan realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan selama periode 2022–2024. Melalui perbandingan antara target, realisasi, persentase capaian, serta rata-rata pertumbuhan anggaran, tabel ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai seberapa jauh alokasi anggaran dimanfaatkan secara optimal pada masing-masing program. Informasi ini penting untuk menilai konsistensi kinerja, mengidentifikasi program yang menunjukkan perkembangan signifikan, serta memahami area yang perlu ditingkatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian	Target			Realisasi			Persentase Capaian			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.225.911.613	23.133.623.142	29.673.487.360	14.397.902.850	20.877.911.559	25.327.874.309	83,58	90,25	85,36	29,97	20,45
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	67.314.800.000	215.581.597.970	166.478.317.750	52.962.212.825	207.455.500.903	150.754.899.262	78,68	96,23	90,56	78,83	97,74
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	64.050.235.000	249.627.022.360	354.419.927.378	56.220.785.498	231.155.394.739	318.826.289.000	87,78	92,6	89,96	97,37	102,52
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.650.000.000	5.800.000.000	20.577.163.050	2.334.139.312	5.512.242.912	19.573.376.805	88,08	95,04	95,12	47,96	53,67
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.110.000.000	6.157.500.000	9.752.896.650	1.821.621.128	5.653.596.775	8.868.244.466	86,33	91,82	90,93	70,82	76,46
Jumlah	153.350.946.613	500.299.743.472	580.901.792.188	127.736.661.613	470.654.646.888	523.350.683.842	83,3	94,07	90,09	80,89	91,78

Sumber: LKJiP DKP, diolah

Berdasarkan tabel di atas, kinerja anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang cukup kuat dalam hal efektivitas penyerapan dan pertumbuhan alokasi anggaran pada hampir semua program. Secara umum, capaian realisasi terhadap target mengalami lonjakan signifikan pada 2023.

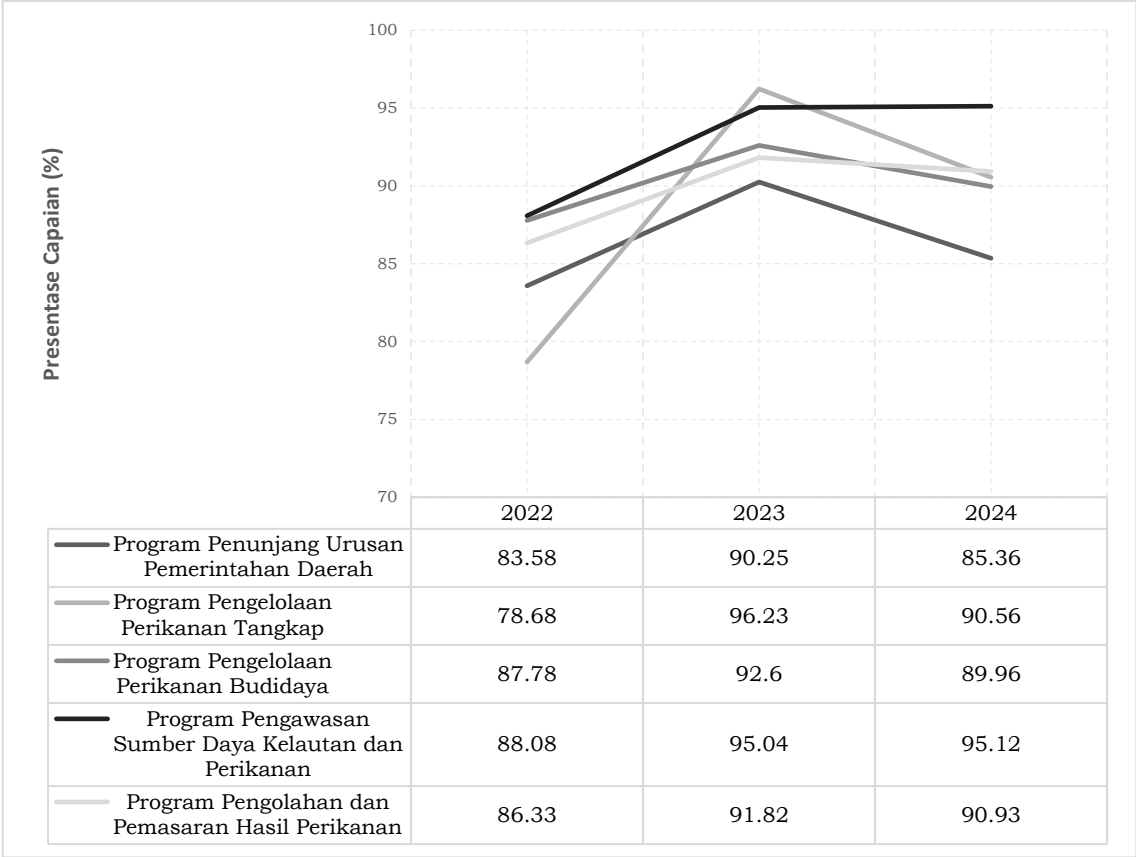
1. Tingkat Capaian Anggaran (Efektivitas Penyerapan)

Tingkat capaian anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang periode pengamatan. Persentase realisasi anggaran meningkat signifikan dari 83,3% pada tahun 2022, kemudian mencapai 94,07% pada tahun 2023, dan mencapai 90,09% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan semakin matangnya proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, diikuti oleh kemampuan eksekusi yang semakin mendekati target alokasi. Konsistensi realisasi di atas 90% pada dua tahun terakhir mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran berada pada jalur yang tepat dan didukung oleh manajemen program yang semakin efektif.

Jika ditinjau menurut masing-masing program, performa penyerapan anggaran juga terlihat solid. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan stabilitas capaian di kisaran 83–90%, yang menandakan konsistensi dalam pengelolaan dukungan administratif sebagai fondasi operasional organisasi. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mengalami peningkatan paling menonjol, melonjak dari 78,68% pada tahun 2022 menjadi 96,23% pada tahun 2023 dan 90,56% pada tahun 2024, menegaskan adanya perbaikan signifikan dalam efektivitas belanja dan pelaksanaan kegiatan di sektor perikanan tangkap.

Pada saat yang sama, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya mempertahankan tingkat serapan yang tinggi dan stabil pada rentang 87–92%, mencerminkan kapasitas pelaksanaan yang kuat di sektor budidaya. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) juga menunjukkan performa yang stabil dengan capaian 95,04% sejak tahun 2023, mengindikasikan efektivitas penggunaan anggaran dalam memastikan keberlanjutan dan keamanan sumber daya. Adapun Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berada pada rentang 86–91%, menunjukkan adanya perbaikan dalam dukungan terhadap rantai nilai pascapanen, terutama pada aspek pengolahan dan pemasaran produk.

Grafik 2.8 Efektifitas Penyerapan Anggaran 2022-2024



Sumber: LKJiP DKP, data diolah.

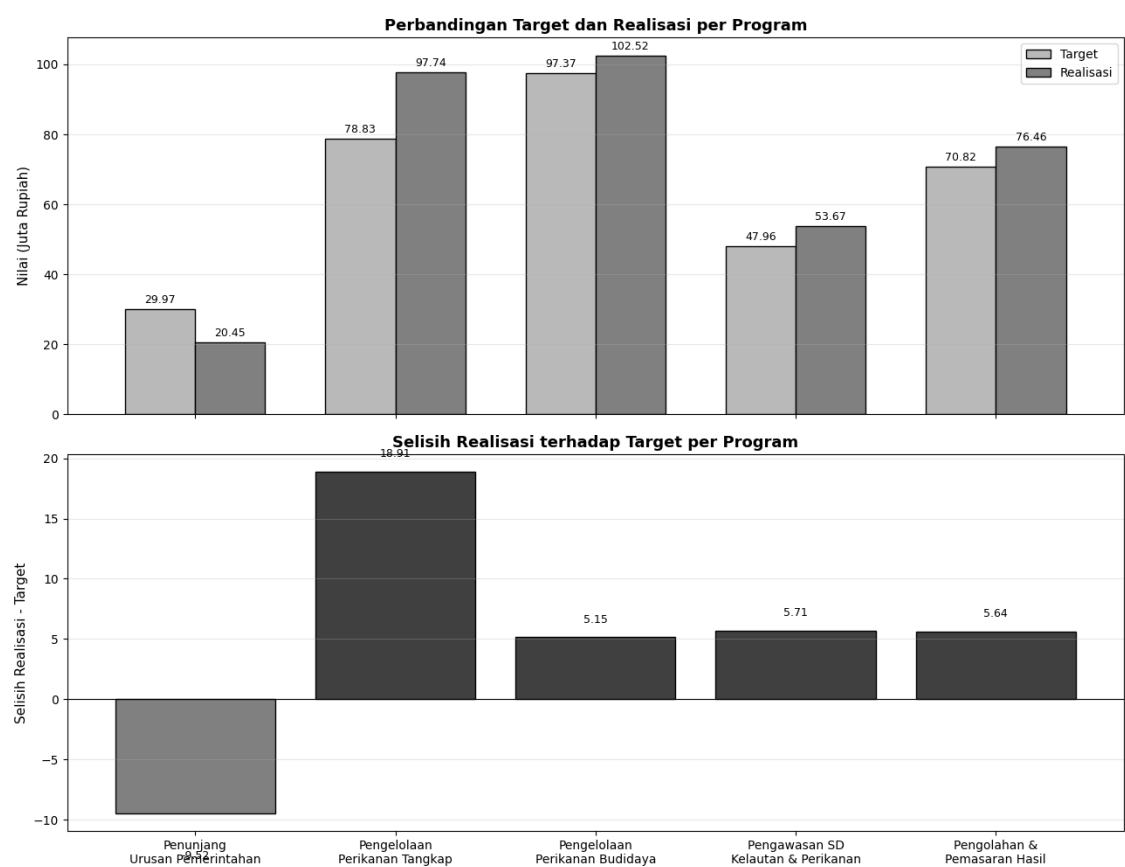
Secara keseluruhan, pola capaian anggaran ini memperlihatkan bahwa DKP tidak hanya berhasil meningkatkan efektivitas penyerapan, tetapi juga menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel dan berorientasi hasil pada setiap program strategisnya.

2. Pertumbuhan Anggaran (Target dan Realisasi)

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa empat dari lima program berhasil melampaui target rata-rata pertumbuhannya. Hal ini menandakan bahwa alokasi anggaran yang meningkat sejak 2023 diikuti (relevan) dengan kemampuan eksekusi program yang kuat. Satu-satunya program yang realisasinya berada di bawah target adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memiliki gap negatif.

Kinerja ini mencerminkan dua hal:(1) adanya ekspansi fiskal yang besar di sektor kelautan dan perikanan, dan (2) kapasitas serapan DKP yang relatif baik dalam mengeksekusi agenda prioritas.

Grafik 2.9 Gap Realisasi terhadap Target Anggaran 2022-2024



Sumber: LKJiP DKP, data diolah.

Berdasarkan grafik di atas, analisis capaian target dan realisasi anggaran menunjukkan variasi kinerja antar program di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menjadi satu-satunya program yang mencatat realisasi di bawah target, dengan capaian 20,45% dibandingkan target 29,97% atau selisih -9,52 poin. Kondisi ini dapat mencerminkan adanya efisiensi belanja pada aktivitas penunjang administratif atau adanya kegiatan yang tidak terserap akibat pengalihan fokus anggaran ke program-program inti yang lebih strategis.

Sementara itu, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap menunjukkan kinerja paling menonjol dengan realisasi tertinggi, yaitu 97,74% dibandingkan target 78,83%, atau melampaui 18,91 poin. Pencapaian ini menggambarkan intensifikasi kegiatan operasional seperti bantuan sarana penangkapan, penguatan kelompok nelayan, hingga dukungan terhadap aktivitas perikanan tangkap di lapangan. Lonjakan realisasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa sektor perikanan tangkap menjadi prioritas utama dalam implementasi anggaran.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, kinerja juga menunjukkan stabilitas yang tinggi. Realisasi mencapai 102,52%, melampaui target 97,37% atau selisih +5,15 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program pengembangan budidaya—termasuk peningkatan sarana produksi, pendampingan teknis, hingga dukungan terhadap komoditas unggulan—dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan turut menunjukkan perbaikan kinerja dengan realisasi 53,67% melampaui target 47,96% atau selisih +5,71 poin. Meskipun peningkatannya tidak sebesar sektor produksi, hasil ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat aspek pengawasan, khususnya dalam pencegahan penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) dan pengelolaan kawasan pesisir.

Terakhir, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan juga mencatat capaian positif dengan realisasi 76,46% melebihi target 70,82% atau selisih +5,64 poin. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas hilirisasi, seperti penguatan fasilitas pascapanen, pengolahan hasil perikanan, dan dukungan terhadap pemasaran produk. Hal ini menandakan bahwa pengembangan rantai nilai perikanan memperoleh perhatian yang memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Data tersebut menjelaskan mayoritas program (4 dari 5) melampaui target, menunjukkan eksekusi anggaran yang kuat pada program inti. Program Perikanan Tangkap adalah yang paling agresif, menunjukkan peningkatan belanja yang besar dan nyata. Program Penunjang menjadi satu-satunya yang tidak mencapai target, kemungkinan karena efisiensi atau pergeseran sumber daya ke program prioritas.

Secara keseluruhan, pola ini menggambarkan pergeseran strategis DKP menuju fokus pada produksi, budidaya, dan penguatan nilai tambah, sekaligus menjaga fungsi pengawasan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah pihak yang menerima manfaat dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pelaksanaan kinerja selama beberapa tahun terakhir dapat diuraikan kelompok sasaran layanan dinas sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan: nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, pengolah hasil perikanan, dan pemasar hasil perikanan;
- 2) Petambak garam;
- 3) Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan;
- 4) Ibu-ibu yang datang ke posyandu (sosialisasi gemar makan ikan); dan
- 5) Anak usia sekolah (terkait MBG atau penurunan stunting).

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi meliputi:

- 1) Perangkat Daerah di Kab. Kutai Kartanegara: DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, BPKAD, Bapenda, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk Balai;
- 5) Pertamina dan BPH Migas;
- 6) Kantor Kesyahbandaran dan Operasional Pelabuhan (KSOP);
- 7) BPJS Ketenagakerjaan;
- 8) Badan Karantina Indonesia;
- 9) BMKG; dan
- 10) Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Untuk memahami tantangan utama dalam pelaksanaan program dan pencapaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, diperlukan identifikasi yang lebih terstruktur mengenai masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Analisis ini disusun dengan mengacu pada capaian target dan realisasi tahun 2022–2024, sehingga terlihat dengan jelas area yang mengalami kemajuan, stagnasi, maupun hambatan. Melalui pemetaan ini, dapat diketahui persoalan inti yang berpengaruh terhadap ketercapaian kinerja, sekaligus aspek yang menjadi penyebab mendasar dari setiap permasalahan. Berikut disajikan tabel analisis masalah pokok, masalah, dan akar masalah berdasarkan masing-masing indikator dan program.

Tabel 2.7. Perumusan Permasalahan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di sektor perikanan dan kelautan.	1. Sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya belum memadai serta perlu peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil kelautan	1.Sarana dan prasarana produksi masih terbatas 2.Penggunaan teknologi penangkapan dan budidaya masih terbatas 3.Infrastruktur rantai dingin dan pascapanen belum memadai. 4.Diversifikasi olahan hasil perikanan masih rendah. 5.Kelembagaan ekonomi nelayan dan pembudidaya belum kuat. 6.Iklim investasi pesisir kurang kondusif dan perizinan kurang terintegrasi. 7.Pemanfaatan kawasan pesisir belum terkoordinasi antarsektor. 8.Masih terbatasnya pendampingan peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan 9.Masih terbatasnya fasilitasi pengawasan budidaya, penangkapan, dan pengolahan ikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Belum optimalnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	2. Perlu peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil kelautan dan perikanan	1. Produksi sangat dipengaruhi musim, cuaca, dan perubahan iklim. 2. Tingginya biaya operasional usaha perikanan (BBM, pakan, logistik). 3. Akses pembiayaan untuk modal usaha masih terbatas. 4. Akses asuransi dan jaminan sosial untuk pelaku usaha masih terbatas. 5. Masyarakat pesisir rentan terhadap bencana pesisir/abrasi. 6. Literasi usaha, manajerial, dan teknologi masih rendah. 7. Informasi harga, pasar, dan teknologi sulit diakses. 8. Masih panjangnya rantai distribusi komoditas perikanan dan kelautan

Sumber: hasil analisis, 2025

2.2.2 Isu Strategis

Untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara lebih terfokus, diperlukan identifikasi isu-isu strategis yang muncul dari evaluasi kinerja program, capaian indikator, serta dinamika perkembangan sektor selama tiga tahun terakhir. Isu strategis ini mencerminkan faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi keberhasilan program, baik dari aspek produksi, tata kelola, kesejahteraan nelayan, hingga efektivitas anggaran dan penguatan ekosistem ekonomi biru. Pemahaman yang jelas mengenai isu-isu tersebut menjadi fondasi penting bagi penyusunan rencana kerja yang lebih responsif, berbasis data, dan berorientasi hasil. Berikut disajikan tabel isu-isu strategis yang diidentifikasi dari hasil analisis tersebut.

Sejalan dengan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tantangan pembangunan kelautan dan perikanan perlu ditangani secara terpadu dengan pendekatan sosial-ekologis dan berbasis daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan sasaran strategis ke depan perlu menitikberatkan pada transformasi sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penguatan kesejahteraan nelayan, tata kelola yang akuntabel, serta perlindungan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Tabel 2.8 Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
– Luas wilayah perairan laut Kukar 222.037 Ha dan luas perairan umum 409.700 Ha, panjang garis pantai sekitar 1.600 km. – Panjang Sungai Mahakan sekitar 920 km dan luas Delta Mahakam 108.000 Ha – Luas Danau Semayang, Danau Melintang, dan sebagian Danau Jempang sekitar 29.000 Ha – Adanya kawasan pesisir dan ekosistem mangrove	– Belum optimalnya peningkatan produksi dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan – Masih rendahnya pendapatan dari produksi dan hasil pengolahan ikan	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM	Geopolitik Dan Geoekonomi	Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif	Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi nonekstraktif	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non-ekstraktif
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku		Peningkatan Kesempatan Kerja	Industri 5.0		Kemandirian Pangan	Penguatan Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional	Mendorong transformasi sektor kelautan dan perikanan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah
Memiliki posisi yang strategis (dekat dengan IKN)		Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN		Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN		Stabilisasi dan penguatan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Perangkat Daerah				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara						Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural	Optimalisasi nilai produksi dan penguatan rantai pasok serta hilirisasi perikanan
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati		Rehabilitasi Lahan Kritis	Dampak Perubahan Iklim Global	Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana	Penguatan pengelolaan wilayah pesisir dan perairan secara terintegrasi dan berkelanjutan

Sumber: hasil analisis, 2025

Potensi daerah menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara lebih optimal. Pertama, masyarakat Kutai Kartanegara memiliki budaya konsumsi ikan yang tinggi. Potensi ini menjadi modal sosial penting untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong permintaan pasar lokal, serta memperluas peluang usaha perikanan skala rumah tangga maupun industri. Tingginya minat konsumsi ikan juga membuka ruang bagi pengembangan produk olahan bernilai tambah.

Kedua, ketersediaan lahan yang luas untuk kegiatan budidaya perikanan, baik di perairan umum, tambak, maupun kolam, memberikan peluang signifikan untuk meningkatkan produksi dan diversifikasi komoditas. Kondisi ini menjadi jawaban strategis atas kebutuhan peningkatan produksi, perluasan skala usaha, serta penguatan rantai nilai perikanan budi daya sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga, adanya teknologi yang tersedia dan semakin mudah diakses—baik teknologi budidaya seperti bioflok, sistem resirkulasi, maupun teknologi pengolahan hasil perikanan—memberikan kesempatan besar untuk modernisasi sektor perikanan. Pemanfaatan teknologi dapat menjawab isu-isu terkait rendahnya produktivitas, kualitas produk, serta ketidakefisienan proses produksi dan pascapanen.

Keempat, keberadaan nelayan dan pembudidaya perikanan yang berpengalaman dan tersebar di banyak wilayah pesisir serta pedalaman menjadi kekuatan utama. Sumber daya manusia ini memiliki pengetahuan lokal yang kuat dan dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, akses sarana produksi, dan penguatan kelembagaan. Potensi ini dapat mengatasi isu-isu mengenai kesejahteraan, produktivitas, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar.

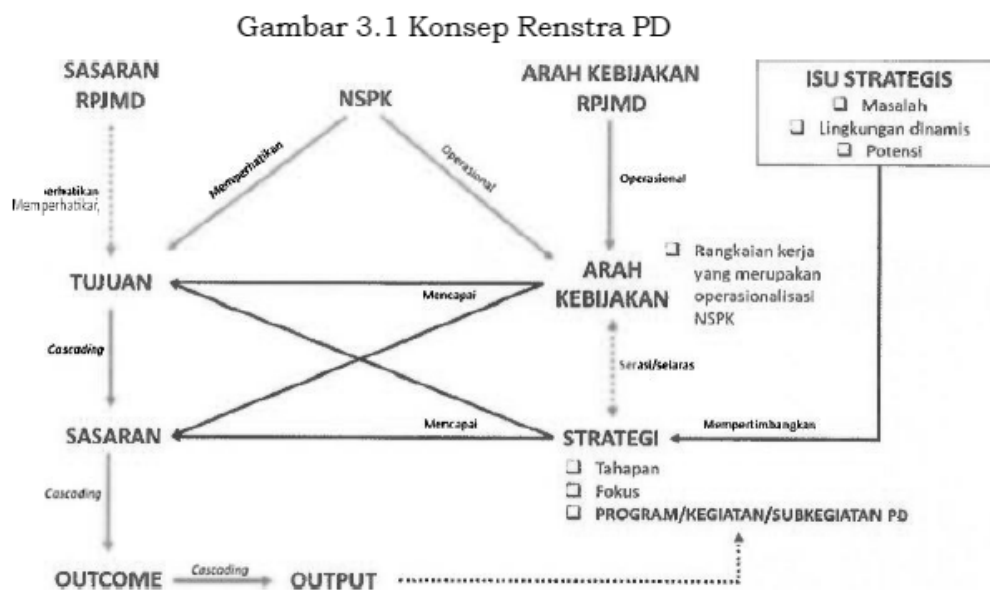
Berbagai potensi tersebut menyediakan landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih efektif, responsif, dan berbasis keunggulan lokal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, Urusan Kelautan dan Perikanan dalam dokumen perencanaan daerah 2025–2029 diarahkan pada upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan. Lebih lanjut perencanaan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 serta isu strategis dinas.

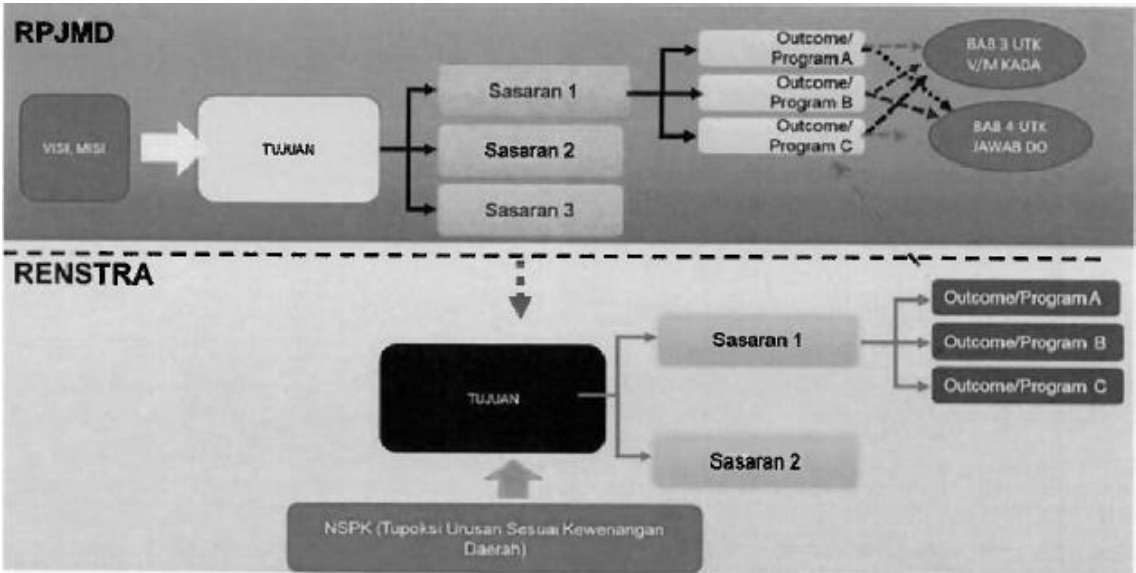


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang berbasis pada analisis empiris, teknokratik, dan berorientasi pada sasaran strategis jangka panjang. Salah satu sasaran strategis dalam RPJMD adalah Sasaran 1.1: “Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah” pada Tujuan 1. Meningkatkan fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan. Sasaran ini secara substansial sejalan dengan upaya mendorong transformasi ekonomi daerah yang tidak lagi bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan, melainkan bertumpu pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah jangka panjang, termasuk kelautan dan perikanan.

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD. Dengan memerhatikan sasaran RPJMD dan NSPK bidang kelautan dan

perikanan serta isu strategis maka ditetapkan tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah "Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan", yang diukur dengan indikator yaitu Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan (%).

Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan diturunkan ke Sasaran. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD. Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Produksi Komoditas Perikanan” dengan indikator Pertumbuhan Produksi Perikanan (%).

Adapun target per tahun untuk masing-masing indikator disajikan pada tabel di bawah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran.

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Baseline 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK: Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan		Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan (%)	22,23	22,67	23,13	23,59	24,06	24,54	25,03
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil		Meningkatnya Produksi Komoditas Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan (%)	14,62	14,91	15,21	15,52	15,83	16,14	16,47
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan										
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap										
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan										
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya										
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan										
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya										
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya										
Sasaran RPJMD: Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan Daerah										

Sumber: hasil analisis, 2025

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Strategi perencanaan jangka menengah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri:

1. **Strategi: Pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap berkelanjutan**, fasilitasi sarana dan prasarana produksi, memperkuat kapasitas kelembagaan nelayan dan optimalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Berbasis Teknologi Informasi, melalui:
 - 1) Penertiban Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan < 5 GT;
 - 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui subsidi BBM;
 - 3) Perlindungan dan pemberdayaan kelompok nelayan melalui program asuransi nelayan dan pendampingan akses permodalan bagi nelayan secara inklusif.
 - 4) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap berbasis teknologi GIS;
 - 5) Pembinaan dan pengembangan usaha nelayan/kelompok skala kecil dan penguatan sistim informasi nelayan secara inklusif termasuk untuk nelayan perempuan dan perempuan kepala keluarga;
 - 6) Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan melalui penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
 - 7) Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di danau, sungai, laut dan pesisir.
 - 8) Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas, pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian penggunaan alat tangkap destruktif dan praktik ilegal.
 - 9) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

2. **Strategi: Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya**, fasilitasi Sarana dan prasarana produksi, memperkuat kapasitas kelembagaan Budidaya dan optimalisasi fungsi UPTD budidaya, melalui:
- 1) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya laut, air payau dan air tawar;
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan,
 - 3) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha budidaya dan fasilitasi kemitraan pelaku usaha budidaya secara inklusif termasuk untuk kelompok rentan.
 - 4) Meningkatkan peran UPTD perikanan budidaya sebagai pusat produksi, distribusi dan pengembangan teknologi perikanan budidaya.
 - 5) Fasilitasi sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB) dan Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SehatKan) secara inklusif termasuk untuk nelayan perempuan dan perempuan kepala keluarga.
 - 6) Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit.
3. **Strategi: Penguatan dan pengembangan/diversifikasi produk perikanan**, merupakan upaya peningkatan kualitas mutu, nilai tambah, daya saing, dan keamanan produk hasil perikanan serta fasilitasi akses pemasaran berbasis digital, melalui:
- 1) Fasilitasi perizinan, akses pasar, promosi produk, peningkatan standarisasi dan keamanan produk.
 - 2) Pengembangan Unit Pengolahan ikan UPI), sarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
 - 3) Peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologisanitasi dan higien untu meningkatkan nilai tambah;
 - 4) Pemantauan dan pengujian mutu produk hasil perikanan.
 - 5) Kampanye Gemarikan (Gerakan Makan Ikan).
 - 6) Pengembangan Sistem manajemen rantai pasokan berbasis teknologi (*Supply Chain Management*).

4. **Strategi: Peningkatan akses pasar ekspor dan promosi produk perikanan**, melalui:

- 1) Diversifikasi pasar ekspor;
- 2) Penyuluhan dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan dan eksportir terkait prosedur ekspor, regulasi pasar internasional, dan cara mengakses pasar global termasuk untuk pelaku usaha perempuan dan perempuan kepala keluarga;
- 3) Fasilitasi Akses ke Pemasaran Digital secara inklusif.

Strategi pembangunan bidang kelautan dan perikanan di atas, dilakukan secara bertahap. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini. Tabel berikut menyajikan penahapan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi fokus Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun, yaitu 2026 hingga 2030.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra

2026 (Tahap I)	2027 (Tahap II)	2028 (Tahap III)	2029 (Tahap IV)	2030 (Tahap V)
Penyusunan dokumen Baseline dan Profil Sektor Perikanan	Formulasi Strategi dan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Sektor Perikanan	Implementasi dan Integrasi Program Pengembangan Sektor Perikanan	Perwujudan fondasi transformasi	Evaluasi Akhir, Penyusunan Rekomendasi, dan Perumusan Tindak Lanjut
Pengumpulan data awal	Pemutakhiran data & dokumentasi	Analisis awal data sektoral	Implementasi optimal program dan kegiatan prioritas	Publikasi data sektoral & pemeliharaan berkelanjutan
Fasilitasi awal nelayan, penyediaan prasarana	Pelatihan nelayan, peningkatan kapasitas	Optimalisasi produktivitas, penguatan TPI	Peningkatan kualitas layanan	Pemeliharaan & standarisasi hasil tangkapan
Fasilitasi awal POKDAKAN, pembangunan unit	Pelatihan & pendampingan pembudidaya	Monitoring & sertifikasi unit budidaya	Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya	Standarisasi & keberlanjutan produksi
Pembentukan POKMASWAS, awal pengawasan	Penguatan pengawasan & laporan	Monitoring kepatuhan & penegakan aturan	Pemantapan sinergi dan kemitraan	Pengawasan berkelanjutan & pemeliharaan SDM
Fasilitasi awal usaha skala mikro/kecil	Pendampingan & fasilitasi standarisasi	Monitoring mutu & pemasaran	Monitoring dan evaluasi intensif	Standarisasi & hilirisasi berkelanjutan

Sumber: hasl analisis, 2025

Penjelasan tahapan setiap tahun diuraikan sebagai berikut:

Tahap I (2026): Persiapan dan Inisiasi

Fokus pada penyusunan dokumen penyusunan dokumen baseline dan profil sektor perikanan, awal pembangunan prasarana, pengumpulan data awal, serta fasilitasi dan pendampingan awal bagi nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan. Tujuannya adalah menciptakan landasan awal yang kuat untuk pelaksanaan program berikutnya.

Tahap II (2027): Penguatan Kapasitas dan Ekspansi

Penekanan pada peningkatan kapasitas SDM, pelatihan, pendampingan kelompok nelayan dan pembudidaya, serta pengembangan infrastruktur perikanan yang telah disiapkan. Pada tahap ini, aktivitas program mulai berjalan secara lebih optimal.

Tahap III (2028): Standarisasi dan Optimalisasi

Fokus pada standarisasi proses pengelolaan, penerapan prosedur teknis dan lingkungan, peningkatan mutu hasil perikanan, serta penguatan monitoring dan evaluasi program. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai standar dan target kinerja.

Tahap IV (2029): Perwujudan Fondasi Transformasi

Kegiatan diarahkan pada implementasi optimal program dan kegiatan prioritas, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya.

Tahap V (2030): Keberlanjutan dan Inovasi

Tahap akhir menitikberatkan pada pemeliharaan capaian program, penerapan inovasi, standarisasi berkelanjutan, dan penyusunan laporan akhir kinerja. Program yang berjalan di tahap ini ditujukan untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan daya saing sektor perikanan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk semakin mengintegrasikan perlindungan ekosistem perairan termasuk mangrove sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, termasuk melalui penguatan pengawasan pesisir dan rehabilitasi kawasan yang terdampak.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan perangkat daerah pada urusan kelautan dan perikanan disusun sebagai bentuk operasionalisasi terhadap NSPK yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan dan kelautan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, arah kebijakan ini juga disusun dengan memerhatikan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yang menekankan peningkatan kemandirian ekonomi pesisir, penguatan ketahanan pangan berbasis perikanan, serta pengembangan nilai tambah dan daya saing produk perikanan.

Dengan demikian, arah kebijakan dalam Renstra ini dirumuskan untuk menjembatani rencana pembangunan daerah dengan intervensi teknis di tingkat sektor. Setiap arah kebijakan diarahkan untuk memastikan konsistensi perencanaan, memperjelas fokus tindakan strategis, serta memperkuat integrasi antara aspek produksi, pengolahan, pemasaran, hingga perlindungan pelaku usaha perikanan. Narasi ini sekaligus menjadi landasan bagi penyusunan tabel arah kebijakan yang memuat prioritas operasional Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan

No.	Operasionalisasi NSPK (Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan)	Arah Kebijakan RPJMD Kutai Kartanegara	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
1	Peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya perikanan melalui efisiensi usaha dan penguatan kapasitas produksi	Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan)	Penguatan sarana-prasarana produksi, efisiensi alat tangkap dan budidaya, serta fasilitasi kemitraan usaha untuk meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan.
2	Peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan, sertifikasi mutu, dan akses pasar	Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata	Penguatan UMKM pengolahan hasil perikanan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi mutu, fasilitasi pemasaran dan ekspor secara inklusif termasuk untuk kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga.
3	Pemanfaatan teknologi perikanan untuk	Peningkatan literasi	Adopsi teknologi budidaya modern (bioflok, RAS), cold

No.	Operasionalisasi NSPK (Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan)	Arah Kebijakan RPJMD Kutai Kartanegara	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
	meningkatkan produktivitas dan daya saing.	kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro	<i>chain system</i> , digitalisasi rantai pasok perikanan
4	Penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan	Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan	Pengembangan kawasan perikanan tangkap dan budidaya terpadu; penataan zonasi pesisir; penguatan pengawasan SD Kelautan dan Perikanan
6	Penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya (kelompok, koperasi, kelembagaan ekonomi rakyat)	Inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif	Pemberdayaan kelembagaan nelayan/pembudidaya, pelatihan, manajemen usaha, dan fasilitasi akses pembiayaan secara inklusif termasuk untuk perempuan nelayan.
5	Penguatan integrasi hulu-hilir dalam sistem rantai nilai perikanan	Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital	Peningkatan konektivitas logistik perikanan, kerja sama pemasaran, integrasi suplai perikanan Kutai Kartanegara dengan pasar IKN
7	Peningkatan ketahanan pesisir dan ekologi melalui pengawasan dan perlindungan sumber daya perikanan	Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah	Penguatan pengawasan IUU Fishing, rehabilitasi pesisir, konservasi kawasan perairan, dan pengendalian pencemaran.
		Industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan Kawasan Strategis hijau	
		Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan kreatif	
		Transformasi menuju ekonomi rendah karbon	

Sumber: hasil analisis, 2025

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan pada urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk memastikan operasionalisasi NSPK bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, dan pengelolaan ruang pesisir. Seluruh intervensi dirancang untuk memperkuat produktivitas, memperbaiki rantai pasok, serta meningkatkan nilai tambah melalui industrialisasi dan sertifikasi mutu. Perencanaan teknis ini diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD, terutama terkait

pengembangan kawasan strategis perikanan, hilirisasi hasil produksi, integrasi ekonomi antarwilayah, serta penguatan daya saing pasar domestik dan ekspor.

Pelaksanaan program selanjutnya difokuskan pada pencapaian indikator kinerja urusan yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, peningkatan kapasitas produksi, serta perbaikan kualitas lingkungan pesisir. Kegiatan dan subkegiatan dirumuskan secara terukur agar mampu menjawab isu-isu strategis sektor kelautan dan perikanan, termasuk peningkatan akses sarana prasarana, penguatan kelembagaan pelaku usaha, percepatan industrialisasi berbasis kawasan, serta pengendalian pemanfaatan ruang pesisir secara berkelanjutan.

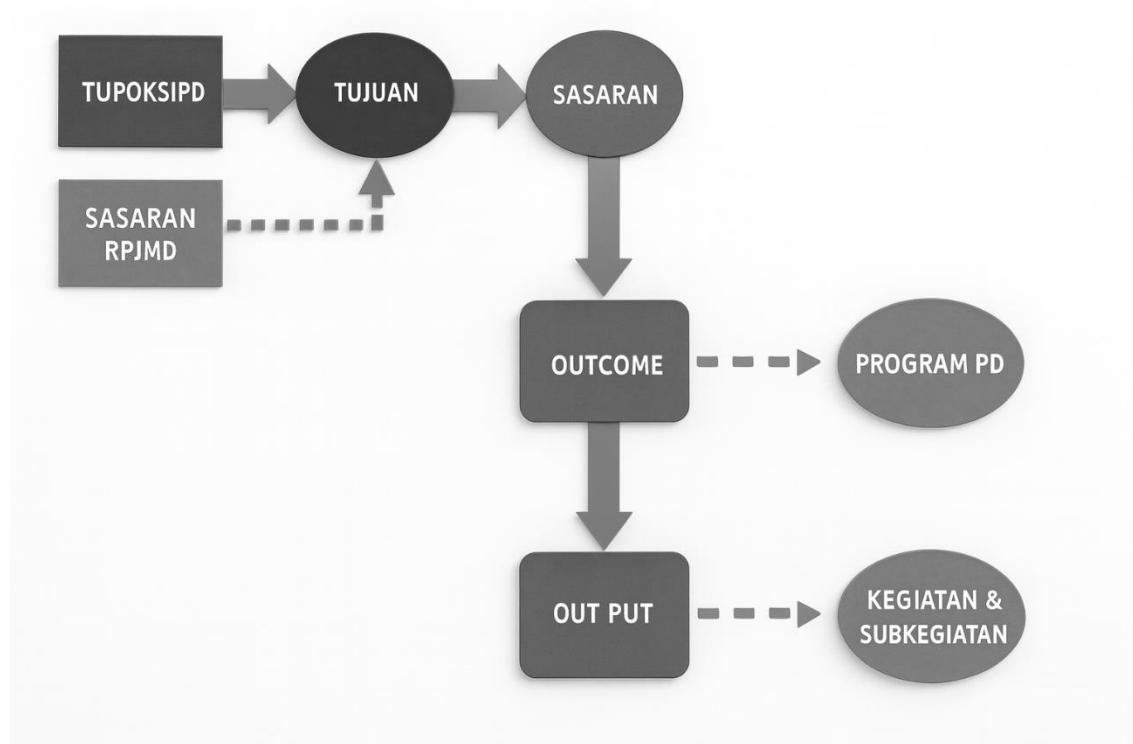
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahun 2025-2029. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kerangka yang konsisten, terukur, dan berbasis analisis kinerja sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Kerangka ini menjadi instrumen untuk memastikan keterpaduan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan, sehingga seluruh intervensi pembangunan dapat disusun secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Konsep struktur dan logika perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dimuat pada gambar di bawah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Berdasarkan kerangka tersebut, Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagaimana dimuat pada bab ini.

4.1. Uraian Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan kerangka pengettian dan kerangka logis, maka disusun program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota. Program ini difokuskan pada penyediaan layanan administratif, pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan kelembagaan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung operasional perangkat daerah.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap guna peningkatan produksi perikanan dari hasil penangkapan ikan, baik di perairan laut maupun perairan umum daratan.

3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan Perairan Umum Daratan guna mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan dan produksi benih ikan air tawar serta untuk mewujudkan kawasan perikanan unggulan.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

Program ini di arahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan hasil perikanan.

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Daerah Kabupaten/Kota.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah;
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah kabupaten/kota.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- b. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil;
- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; dan
- c. Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Sub kegiatan dalam rencana pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan;
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan;
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan;
- 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan;

- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan;
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan;
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan;
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan;
- 10) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan;
- 11) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan;
- 12) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan;
- 13) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan;
- 14) Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan;
- 15) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan;
- 16) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan;
- 17) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan;
- 18) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan;
- 19) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan;

- 20) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan; dan
- 21) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						NON URUSAN (GENERIK)	
NSPK: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya	Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan				Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan		

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya							
Sasaran RPJMD: Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan Daerah		Meningkatnya Produksi Komoditas Perikanan.			Pertumbuhan Produksi Perikanan		
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	
				Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas dan Terintegrasi	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung	Jumlah walidata/statistik sektoral yang	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Statistik Sektoral Daerah	terselenggara dan terdokumentasi		
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah laporan atau dataset hasil pengumpulan data statistik sektoral yang disusun	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dokumen Renstra dan Renja)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Kelautan dan Perikanan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tercapainya Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/ Semesteran SKPD.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terselenggaranya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Direkonsiliasi.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD yang dilakukan Penatausahaan.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Pendapatan Daerah yang Tertib dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	umlah laporan Retribusi Daerah yang Akuntabel.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian yang Tertib dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Data Pegawai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
				Terselenggaranya Tata Kelola Administrasi Perkantoran yang Tertib dan Sesuai Ketentuan	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Disediakan.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan BacaanPeraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perundang-Undangan	dan Advetorial yang disediakan.		
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta Pada Unit Kearsipan (UK).	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	
				Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan diadakan.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya layanan jasa penunjang yang sesuai ketentuan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Waktu penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Waktu Layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan yang tersedia (dokumen/tahun)	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah unit prasarana usaha perikanan tangkap yang disediakan (unit/tahun)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah unit prasarana usaha perikanan tangkap yang disediakan (unit/tahun)	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Kapasitas KUB	Jumlah KUB Naik Kelas	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang mengikuti pelatihan/pengembangan kapasitas (orang)	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelembagaan nelayan kecil yang difasilitasi/ dibentuk/ dikembangkan (kelembagaan)	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah nelayan/kelompok nelayan yang menerima fasilitasi pendanaan, pembiayaan, atau kemitraan usaha (unit/kelompok)	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil yang disediakan (unit)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				Tersedianya Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola dan beroperasi secara aktif (unit)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase nelayan yang terlayani melalui TPI (%)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Meningkatnya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar kapal Perikanan Diterbitkan	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan ≤ 10 GT yang ditetapkan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	
				Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan (dokumen)	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	
				Terfasilitasinya Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT yang Terdaftar	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen resmi persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan ≤ 10 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya Kapasitas Pokdakan	Jumlah POKDAKAN Yang Naik Kelas	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelembagaan/kelompok pembudidaya ikan kecil (POKDAKAN) yang dibentuk atau dikembangkan melalui fasilitasi.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Meningkatnya Rekomendasi Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Yang Diterbitkan	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
				Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan.	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Jumlah unit pembudidayaan ikan yang dikelola sesuai standar teknis dan lingkungan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya database atau laporan lengkap pembudidayaan ikan di kabupaten/kota.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana pembudidayaan ikan yang tersedia dan siap digunakan sesuai kebutuhan pembudidaya di kabupaten/kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah sampel ikan dan lingkungan budidaya yang teruji kesehatannya	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Luas lahan yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk pembudidayaan ikan di darat	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang disusun	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Tersedianya Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Meningkatnya Kapasitas POKMASWAS	Jumlah POKMASWAS Yang Difasilitasi	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
				Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Persentase usaha pembudidayaan ikan yang mematuhi peraturan dan standar teknis	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					sesuai kewenangan kabupaten/kota		
				Terawatnya Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	
				Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Persentase usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang mematuhi peraturan dan standar teknis sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	
				Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	
			Meningkatnya Produksi, Konsumsi dan Ekspor Hasil Perikanan		Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
					Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		
					Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan		
				Meningkatnya Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Rekomendasi SPDI dan rekomendasi HACCP yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi TDU Pengolahan dan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan rekomendasi HACCP yang diterbitkan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diterbitkan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Tersedianya database atau laporan lengkap usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan di kabupaten/kota.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko Kepmen 050 5889	Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Berusaha Sesuai Dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	
				Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mengikuti pembinaan penerapan persyaratan perizinan sesuai skala usaha dan tingkat risiko.	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Meningkatnya Kelengkapan Sarana Pengolahan dan Pemasaran POKLAHSAR	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				138.554.799.081,00		498.900.074.141,89		498.595.499.952,03		502.048.961.909,99		504.789.385.100,70		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.134.399.081,00		27.665.480.957,00		28.635.480.957,00		23.227.666.957,00		22.815.480.957,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,82	70,5	20.134.399.081,00	72,5	27.665.480.957,00	75,0	28.635.480.957,00	75,5	23.227.666.957,00	80,0	22.815.480.957,00	3.25.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				650.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		
Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas dan Terintegrasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	650.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.050.000.000,00		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3		2		2		3		3			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1		1		1		1	
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	150.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	3	350.000.000,00	3	400.000.000,00		
3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.25.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
3.25.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.278.500.957,00		17.053.500.957,00		17.053.500.957,00		17.053.500.957,00		17.053.500.957,00		
Tercapainya Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	162	16.278.500.957,00	162	17.053.500.957,00	162	17.053.500.957,00	162	17.053.500.957,00	162	17.053.500.957,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	18		18		18		18		18			
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.003.500.957,00		16.658.500.957,00		16.658.500.957,00		16.658.500.957,00		16.658.500.957,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120	162	16.003.500.957,00	162	16.658.500.957,00	162	16.658.500.957,00	162	16.658.500.957,00	162	16.658.500.957,00		
3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	3	50.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
3.25.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				225.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	18	225.000.000,00	18	350.000.000,00	18	350.000.000,00	18	350.000.000,00	18	350.000.000,00		
3.25.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	1	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.25.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				55.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		
Terselenggaranya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0	55.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00	1	185.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	0	3	3	3	3	3	3					
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	1	1	1	1	1	1	1					
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	1	1	1	1	1	1	1					
3.25.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
3.25.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	1	25.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
3.25.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.25.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	0	0,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
3.25.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terselenggaranya Administrasi Pendapatan Daerah yang Tertib dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.25.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.25.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				225.000.000,00		575.000.000,00		575.000.000,00		1.037.186.000,00		575.000.000,00		
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian yang Tertib dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	225.000.000,00	1	575.000.000,00	1	575.000.000,00	1	1.037.186.000,00	1	575.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	210							486					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		482.186.000,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	210		0,00		0,00		0,00	486	482.186.000,00		0,00		
3.25.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.25.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.25.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.25.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	50	150.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00		
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				455.000.000,00		1.560.000.000,00		1.560.000.000,00		1.560.000.000,00		1.560.000.000,00		
Terselenggaranya Tata Kelola Administrasi Perkantoran yang Tertib dan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.153	0	455.000.000,00	2.153	1.560.000.000,00	2.153	1.560.000.000,00	2.153	1.560.000.000,00	2.153	1.560.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	32	32		32		32		32		32			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	54		54		54		54		54			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	6		6		6		6		6			
	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	3	10.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	32	32	100.000.000,00	32	500.000.000,00	32	500.000.000,00	32	500.000.000,00	32	500.000.000,00		
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25	40.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00		
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	50.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00		
3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.153	0	0,00	2.153	65.000.000,00	2.153	65.000.000,00	2.153	65.000.000,00	2.153	65.000.000,00		
3.25.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	54	180.000.000,00	54	650.000.000,00	54	650.000.000,00	54	650.000.000,00	54	650.000.000,00		
3.25.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	6	25.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				950.000.000,00		5.000.000.000,00		5.970.000.000,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Ketentuan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	950.000.000,00	0	5.000.000.000,00	1	5.970.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0							
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1							
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2		0		0							
3.25.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		570.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	10	570.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				450.000.000,00		0,00		400.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	2	450.000.000,00	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.25.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00		0,00		0,00		
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				775.898.124,00		1.201.480.000,00		1.201.480.000,00		1.201.480.000,00		1.201.480.000,00		
Terselenggaranya layanan jasa penunjang yang sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	775.898.124,00	12	1.201.480.000,00	12	1.201.480.000,00	12	1.201.480.000,00	12	1.201.480.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	64	18		18		18		18					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00		
3.25.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	25.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.898.124,00		801.480.000,00		801.480.000,00		801.480.000,00		801.480.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	64	18	400.898.124,00	18	801.480.000,00	18	801.480.000,00	18	801.480.000,00	18	801.480.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				745.000.000,00		1.180.500.000,00		1.180.500.000,00		1.180.500.000,00		1.180.500.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	60	745.000.000,00	60	1.180.500.000,00	60	1.180.500.000,00	60	1.180.500.000,00	60	1.180.500.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3		3		3		3		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	261		261		261		261		261			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	19		19		19		19		19			
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				115.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	23	19	115.000.000,00	19	190.000.000,00	19	190.000.000,00	19	190.000.000,00	19	190.000.000,00		
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	60	100.000.000,00	60	210.000.000,00	60	210.000.000,00	60	210.000.000,00	60	210.000.000,00		
3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000,00		230.500.000,00		230.500.000,00		230.500.000,00		230.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	261	250.000.000,00	261	230.500.000,00	261	230.500.000,00	261	230.500.000,00	261	230.500.000,00		
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				230.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	230.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
3.25.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				34.510.400.000,00		220.563.248.416,69		220.697.674.227,03		211.502.150.184,99		244.835.559.375,70		
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	116.850,23	162.592	34.510.400.000,00	162.916	220.563.248.416,69	206.329	220.697.674.227,03	232.946	211.502.150.184,99	263.229	244.835.559.375,70	3.25.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kelautan dan Perikanan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				2.950.000.000,00		1.420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	16.290		2.950.000.000,00		1.420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	7	10		9		8		8		8			
	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	26												
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				150.000.000,00		1.420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	7	10	150.000.000,00	9	1.420.000.000,00	8	420.000.000,00	8	420.000.000,00	8	420.000.000,00		
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				2.800.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	26		2.800.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	16.290		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.215.000.000,00		217.643.248.416,69		218.777.674.227,03		209.432.150.184,99		242.765.559.375,70		
Meningkatnya Kapasitas KUB	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	100	100	30.215.000.000,00	100	217.643.248.416,69	100	218.777.674.227,03	100	209.432.150.184,99	100	242.765.559.375,70		
	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.000	500		500		500		500		500			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	657		7.008		7.008		7.008		7.008			
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	500	500		1.000		1.000		1.000		1.000			
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				5.000.000.000,00		14.000.000.000,00		14.000.000.000,00		14.000.000.000,00		14.000.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	500	500	5.000.000.000,00	1.000	14.000.000.000,00	1.000	14.000.000.000,00	1.000	14.000.000.000,00	1.000	14.000.000.000,00		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	100	100	100.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				150.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.000	500	150.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				24.965.000.000,00		202.643.248.416,69		203.777.674.227,03		194.432.150.184,99		227.765.559.375,70		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	0	657	24.965.000.000,00	7.008	202.643.248.416,69	7.008	203.777.674.227,03	7.008	194.432.150.184,99	7.008	227.765.559.375,70		
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				695.400.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3	3	695.400.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00		
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				695.400.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3	3	695.400.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00		
3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				550.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	2.000	1.000	550.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00		
	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1											
3.25.03.2.04.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.25.03.2.04.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	2.000	1.000	500.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00		
3.25.03.2.06 - Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	50	10	100.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1											
3.25.03.2.06.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.25.03.2.06.0003 - Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	50	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				72.100.000.000,00		231.991.344.768,00		231.562.344.768,00		248.619.144.768,00		217.638.344.768,00		
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	206.327,78	243.888	72.100.000.000,00	274.374	231.991.344.768,00	309.494	231.562.344.768,00	349.419	248.619.144.768,00	394.843	217.638.344.768,00	3.25.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				3.300.000.000,00		12.350.000.000,00		12.350.000.000,00		12.350.000.000,00		12.350.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pokdakan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	100	100	3.300.000.000,00	100	12.350.000.000,00	100	12.350.000.000,00	100	12.350.000.000,00	100	12.350.000.000,00		
	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya (Kelompok)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	500	500		500		500		500		500			
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	85	30		30		30		30		30			
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	85	30	400.000.000,00	30	500.000.000,00	30	500.000.000,00	30	500.000.000,00	30	500.000.000,00		
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				250.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	100	100	250.000.000,00	100	850.000.000,00	100	850.000.000,00	100	850.000.000,00	100	850.000.000,00		
3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				650.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	100	100	650.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00		
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	500	500	2.000.000.000,00	500	10.000.000.000,00	500	10.000.000.000,00	500	10.000.000.000,00	500	10.000.000.000,00		
3.25.04.2.03 - Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Rekomendasi Tanda Daftar Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	1.000	1.000	100.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00		
3.25.04.2.03.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	1.000	1.000	100.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				68.700.000.000,00		219.141.344.768,00		218.712.344.768,00		235.769.144.768,00		204.788.344.768,00		
Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	13.400	1.778	68.700.000.000,00	5.000	219.141.344.768,00	5.000	218.712.344.768,00	5.000	235.769.144.768,00	5.000	204.788.344.768,00		
	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	0	0		8		8		11		8			
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	35	11		10		10		9		10			
	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	7	2		2		2		2		2			
	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	0	0		2		1		1		1			
	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	7	2	150.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000.000,00		25.568.200.000,00		25.639.200.000,00		15.696.000.000,00		11.715.200.000,00		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	35	11	30.000.000.000,00	10	25.568.200.000,00	10	25.639.200.000,00	9	15.696.000.000,00	10	11.715.200.000,00		
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	2	200.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				38.350.000.000,00		190.000.000.000,00		190.000.000.000,00		190.000.000.000,00		190.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	13.400	1.778	38.350.000.000,00	5.000	190.000.000.000,00	5.000	190.000.000.000,00	5.000	190.000.000.000,00	5.000	190.000.000.000,00		
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0,00		651.965.480,00		651.965.480,00		651.965.480,00		651.965.480,00		
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	0	0	0,00	10	651.965.480,00	10	651.965.480,00	10	651.965.480,00	10	651.965.480,00		
3.25.04.2.04.0012 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				0,00		600.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	0	0	0,00	2	600.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan				0,00		1.271.179.288,00		1.271.179.288,00		28.271.179.288,00		1.271.179.288,00		
Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	0	0	0,00	8	1.271.179.288,00	8	1.271.179.288,00	11	28.271.179.288,00	8	1.271.179.288,00		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.250.000.000,00		5.050.000.000,00		5.050.000.000,00		5.050.000.000,00		5.050.000.000,00		
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	90	92	3.250.000.000,00	93	5.050.000.000,00	94	5.050.000.000,00	95	5.050.000.000,00	96	5.050.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				3.250.000.000,00		5.050.000.000,00		5.050.000.000,00		5.050.000.000,00		5.050.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas POKMASWAS	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	50	10	3.250.000.000,00	10	5.050.000.000,00	10	5.050.000.000,00	10	5.050.000.000,00	10	5.050.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	20	50		50		50		50		50			
	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat (Unit)	0	7		7		7		7		7		7	
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	20	50	150.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00	50	250.000.000,00		
3.25.05.2.01.0005 - Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat (Unit)	0	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00		
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	50	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				250.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Usaha Penangkapan ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	100	100	250.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00		
3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan				150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	0	50	150.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
3.25.05.2.01.0011 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan				2.500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)	0	12	2.500.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				6.560.000.000,00		11.630.000.000,00		12.650.000.000,00		13.650.000.000,00		14.450.000.000,00		
Meningkatnya Produksi, Komsumsi dan ekspor hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Orang)	67,13	34,88	6.560.000.000,00	35,64	11.630.000.000,00	36,42	12.650.000.000,00	37,22	13.650.000.000,00	38,03	14.450.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	23.900	26.250		27.563		28.941		30.388		31.907			
	Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan (Ton)	1.761	1.845		1.891		1.938		1.987		2.037			
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		
Meningkatnya Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Rekomendasi SPDI dan rekomendasi HACCP yang diterbitkan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	8	500.000.000,00	8	1.000.000.000,00	8	1.000.000.000,00	8	950.000.000,00	8	950.000.000,00		
	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	80	30		50		50		50		50			
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	9	0		50		200		200		200			
3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	9	0	0,00	50	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00	200	50.000.000,00		
3.25.06.2.01.0004 - Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				100.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	80	30	100.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00	50	500.000.000,00		
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	8	400.000.000,00	8	450.000.000,00	8	450.000.000,00	8	400.000.000,00	8	400.000.000,00		
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				500.000.000,00		630.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	15	17	500.000.000,00	19	630.000.000,00	19	650.000.000,00	20	700.000.000,00	15	500.000.000,00		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				500.000.000,00		630.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	15	17	500.000.000,00	19	630.000.000,00	19	650.000.000,00	20	700.000.000,00	15	500.000.000,00		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				5.560.000.000,00		10.000.000.000,00		11.000.000.000,00		12.000.000.000,00		13.000.000.000,00		
Meningkatnya Kelengkapan Sarana Pengolahan dan Pemasaran POKLAHSAR	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	50	100	5.560.000.000,00	50	10.000.000.000,00	50	11.000.000.000,00	50	12.000.000.000,00	50	13.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	50	100		100		100		100		100			
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		4.000.000.000,00		5.000.000.000,00		6.000.000.000,00		7.000.000.000,00		
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	50	100	300.000.000,00	50	4.000.000.000,00	50	5.000.000.000,00	50	6.000.000.000,00	50	7.000.000.000,00		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.260.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	50	100	5.260.000.000,00	100	6.000.000.000,00	100	6.000.000.000,00	100	6.000.000.000,00	100	6.000.000.000,00		

Sumber: SIPD Renstra, 2025

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD telah ditetapkan berbagai program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah menjadi program yang strategis dan penting serta perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan RPJMD terdapat 2 (dua) program prioritas pada urusan kelautan dan perikanan yaitu: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Adapun sub kegiatan dari kedua program prioritas tersebut dimuat pada tabel di bawah. Lebih lanjut kedua program prioritas tersebut juga menjadi pelaksana bagi program prioritas bupati yaitu **“Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh”**.

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota: 1.1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; 1.2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; 1.3. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap. 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota: 2.1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil; 2.2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil; 2.3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; 2.4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil;	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI): • Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota: 4.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT. 4.2. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT 5. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota: 5.1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT; 5.2. Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP).	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya	1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil: 1.1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil; 1.2. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil; 1.3. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan dan kemitraan usaha; 1.4. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 2. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota: • Pelayanan penerbitan TDPIK; 3. Pengelolaan pembudidaya ikan: 3.1. Penyediaan data dan informasi pembudidaya Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. 3.2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 3.3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 3.4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 3.5. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan di daerah; 3.6. Monitoring kesehatan dan lingkungan budidaya dalam satu daerah kabupaten/kota; 3.7. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat; 3.8. Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	

Sumber: hasl analisis, 2025

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) mencerminkan capaian hasil atau outcome yang bersifat strategis dan berdampak luas, baik pada masyarakat maupun pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD. IKU menjadi tolok ukur keberhasilan program secara keseluruhan dalam jangka menengah. Berikut IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan total nilai Produksi sektor Perikanan	Persen	22,67	23,13	23,59	24,06	24,54	25,03	
2	Pertumbuhan Produksi Perikanan	Persen	14,91	15,21	15,52	15,83	16,14	16,47	

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci berfokus pada hasil spesifik dari setiap program/kegiatan yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. IKK digunakan untuk memantau capaian output yang mendukung pencapaian IKU. Berikut IKK Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	361.959	406.480	457.290	515.824	582.365	658.072	
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/Tahun	69,14	71,22	73,35	75,56	77,82	80,16	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam merumuskan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Dokumen ini memuat berbagai isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung visi pembangunan daerah serta memperkuat ketahanan ekonomi biru di tingkat kabupaten.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA-PD.
2. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan perencanaan tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahunan.
3. Kepala Dinas melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dengan menggunakan hasil Evaluasi Renja.
4. Evaluasi hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
5. Jika berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan Renstra, maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pemantauan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi kinerja Renstra dilakukan secara tahunan dan pada akhir periode Renstra sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui:

1) Pemantauan Berkala.

Pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara periodik untuk mengidentifikasi capaian kinerja, permasalahan, dan hambatan yang dihadapi.

Tabel 5.1 Instrumen *Monitoring*

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi s.d Periode Berjalan	Persentase Capaian (%)	Permasalahan/ Hambatan	Upaya Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										

2) Evaluasi Kinerja.

Evaluasi dilakukan terhadap indikator kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagai dasar penilaian efektivitas pelaksanaan Renstra.

Tabel 5.2 Instrumen Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun Berjalan	Capaian Kinerja (%)	Kategori Kinerja	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Rekomendasi Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										

Tabel 5.3 Instrumen Evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target Renstra	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Efektivitas	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								

3) Pelaporan Kinerja.

Hasil pengendalian dan evaluasi dituangkan dalam laporan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya serta sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penyesuaian program dan kegiatan.

Tabel 5.4 Instrumen Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi Renstra

No	Temuan Hasil Monev	Dampak terhadap Kinerja	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2025-2029 akan memperkuat pembangunan sektor perikanan yang inklusif, berkelanjutan, adil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta pelaku usaha perikanan tanpa terkecuali. Pembangunan sektor perikanan tidak hanya berorientasi produksi, tetapi juga berpihak terhadap kelompok yang memiliki akses paling terbatas.

Kami menyadari bahwa penyempurnaan dokumen ini sangat bergantung pada masukan dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat diharapkan demi terwujudnya rencana strategis yang adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku sektor kelautan dan perikanan di Kutai Kartanegara.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang inklusif dan berdaya saing menuju Kutai Kartanegara yang berkelanjutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Jend. A. Yani No. 50 Telp. (0541) 661739 Kode Pos 75512

Website : <http://dkp/kukarkab.go.id/> email : dnsperikanankelautan@gmail.com

T E N G G A R O N G

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : P-4322/DKP/A/500.5.1/12/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan RENSTRA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menghimpun dan mengolah data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan RENSTRA;
 2. Menyusun rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan;
 4. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Penyusunan RENSTRA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggara

Pada tanggal : 31 Desember 2024



KEPALA DINAS,

MUSLIK, S.Pi, M.Si

NIP. 19710113 199803 1 005

Lampiran I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : P-4322/DKP/A/500.5.1/12/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Muslik, S.Pi, M.Si	Kepala Dinas	Pengarah
2	Fadly, S.Pi	Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
3	Eny Hariyana, S.TP	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
4	Asli Husaini, S.Pi	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Anggota
5	Sabar Handoyo, S.Pi	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	Anggota
6	Dr. Ir. Sayid Syarief Fathillah, M.P	Kepala Bidang Pengelolaan TPI dan Pengawasan SDI	Anggota
7	Ir. Noor Lely	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
8	Irwan S, S.Pi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9	Anwar	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
10	Ali Rahman, S.Pi, M.Si	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota
11	Nurul Jannah, S.Pi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota
12	Yusha Abdi, S.Sos	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Anggota
13	Helda, S.Pi	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Anggota
14	Indra Saputra, S.Pi	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Anggota
15	Indra Wahyudi, S.Pi	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Anggota
16	Riduansyah, S.Pi	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Anggota
17	Syahrul, S.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
18	Faturrahman, S.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Anggota
19	Indera Wahyudi, S.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Anggota

KEPALA DINAS,

MUSLIK, S.Pi, M.Si
NIP. 19710113 199803 1 005

Lampiran 2. : **Pohon Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029**

Sasaran 1.1. RPJMD :
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Sektor Perikanan
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Sektor Perikanan

Meningkatnya Produksi Komoditas Perikanan

Pertumbuhan Produksi Perikanan

